



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KONAWA UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**KEWENANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KONAWA UTARA  
DALAM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN**



**DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA  
JUNI 2008**



6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemberintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Neagara RI Nomor 4741),

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
DAN  
BUPATI KONAWE UTARA**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA DALAM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN.

**BAB. I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Utara ;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- e. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara;
- f. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah Negara RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- g. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- h. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang, dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang – undangan;
- i. Urusan Pemerintahan adalah fungsi – fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi – fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
- j. Kewenangan daerah .....

- j. Kewenangan Daerah adalah mencakup dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertanahan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal nasional, serta agama;
- k. Peraturan Daerah adalah peraturan daerah Kabupaten Konawe Utara;
- l. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Konawe Utara sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- m. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- n. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara, yang terdiri dari Badan, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

**BAB. II**  
**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

**Pasal 2**

- (1) Dengan peraturan daerah ini ditetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

**Pasal 3**

- (1) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, berkaitan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) meliputi:
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Lingkungan Hidup;
  - d. Pekerjaan Umum;
  - e. Penataan Ruang;
  - f. Perencanaan Pembangunan;
  - g. Perumahan;
  - h. Kepemudaan dan Olahraga;
  - i. Penanaman Modal;
  - j. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - l. Ketenagakerjaan;
  - m. Ketahanan Pangan;
  - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - p. Perhubungan
  - q. Komunikasi dan Informatika;
  - r. Pertanahan;
  - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  - t. Otonomi Daerah...

- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
  - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - v. Sosial;
  - w. Kebudayaan;
  - x. Statistik;
  - y. Kearsipan; dan
  - z. Perpustakaan.
- (3) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah Kabupaten Konawe Utara;
- (4) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) meliputi:
- a. Kelautan dan Perikanan;
  - b. Pertanian;
  - c. Kehutanan;
  - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - e. Pariwisata;
  - f. Industri;
  - g. Perdagangan; dan
  - h. Ketransmigrasian.

#### **Pasal 4**

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud Pasal 3 diatas, selanjutnya diuraikan menurut sub bidang dan sub-sub bidang seperti Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 5**

Lampiran Peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud pasal 4 di atas adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Peaturan Daerah ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selanjutnya menjadi dasar untuk membentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

### **BAB. III KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh pemerintah dan / atau pemerintah propinsi kepada Pemerintah Kabupaten;
- (2) Pelaksanaan Tugas...

- (2) Pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Ayat ( 1 ) dipertanggung jawabkan oleh Bupati kepada yang menyerahkan tugas tersebut ;
- (3) Penyerahan tugas pembantuan tersebut disertai dengan penyerahan pembiayaan dan peralatan yang diperlukan.

#### **Pasal 8**

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara, dapat menyelenggarakan sendiri atau menugaskan dan atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

#### **Pasal 9**

Penjabaran Teknis terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara akan diatur melalui Peraturan Bupati.

### **BAB. IV KETENTUAN PENUTUP**


#### **PASAL 10**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Bupati sepanjang menyangkut peraturan pelaksanaannya.

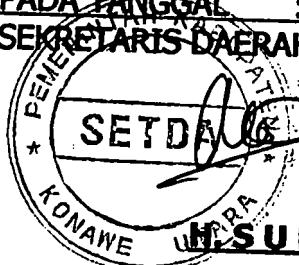
#### **PASAL 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

DIETAPKAN DI : WANGGUDU  
PADA TANGGAL : 11 JUNI 2008  
Pj. BUPATI KONAWE UTARA  
  
**ASWADI SULAIMAN, P**

DIUNDANGKAN DI : WANGGUDU  
PADA TANGGAL : 24 JUNI 2008  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

  
**SETDA**  
**M. SUDIRO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2008**  
**NOMOR**

→ 1 ←

**LAMPIRAN : PERDA KABUPATEN KONAWE UTARA**  
**NOMOR : 1 TAHUN 2008**  
**TANGGAL : 11 JUNI 2008**

**A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standart	1. a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di Kabupaten / Kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi b. - c. Perencanaan Operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional. 2. a. - b. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat Kabupaten / Kota. 3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 4. - 5. a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan / penyelenggara pendidikan nonformal. b. - c. Penyelenggaraan dan / atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional d. Penyelenggaraan dan / atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah. 6. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi 7. Pemantauan dan Evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. 8. - 9. - 10. a. - b. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat Kabupaten / Kota

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
2. Pembiayaan		1. a. - b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
3. Kurikulum		1. a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.  2. a. - b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.  3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
4. Sarana dan prasarana		1. a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.  2. a. - b. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
5. Pendidikan dan Tenaga Kependidikan		1. a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.  2. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di Kabupaten / Kota.



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		3. ✓ Peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 4. a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. b. Perbentihan pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan. 5. - 6. -
6. Pengendalian Mutu Pendidikan	1. Penilaian Hasil Belajar	1. - 2. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala Kabupaten/Kota. 4. - 5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala Kabupaten/Kota.
	2. Evaluasi	1. a. - b. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala Kabupaten / Kota. 2. a. - b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala Kabupaten/Kota.
	3. Akreditasi	1. a. - b. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	4. Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. -</li> <li>2.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.</li> <li>b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</li> <li>c. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.</li> <li>d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala Kabupaten/Kota.</li> </ol> </li> </ol>

**B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan Surveilans apidemologi, penyelidikan kejadian luar skala Kabupaten/Kota.</li><li>2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala Kabupaten/Kota.</li><li>3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala Kabupaten / Kota.</li><li>4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala Kabupaten/Kota.</li><li>5. -</li></ol>
	2. Lingkungan Sehat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala Kabupaten/Kota.</li><li>2. Penyehatan lingkungan.</li></ol>
	3. Perbaikan Gizi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan pencegahan Surveilans gizi buruk skala Kabupaten/Kota.</li><li>2. <ol style="list-style-type: none"><li>a. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala Kabupaten/Kota.</li><li>b. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.</li></ol></li></ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	4. Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala Kabupaten/Kota.</li> <li>2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala Kabupaten/Kota.</li> <li>3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala Kabupaten/Kota.</li> <li>4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai aturan perundang – undangan.</li> <li>5. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah Provinsi.</li> <li>b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah kelas C, kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktek berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.</li> </ol> </li> </ol>
2. Pembiayaan Kesehatan	1. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan/penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.</li> <li>b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas pembantuan).</li> <li>c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.</li> </ol> </li> </ol>
3. Sumber Daya Masnusia Kesehatan	1. Peningkatan jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis.</li> <li>2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala Kabupaten/Kota.</li> <li>3. Pelatihan teknis skala Kabupaten/Kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian izin praktek tenaga kesehatan tertentu.
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan.	1. Penyediaan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala Kabupaten/Kota. 2. a. Pengambilan sampling/ccontoh persediaan farmasi di lapangan. b. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi. c. Pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga. d. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT kelas I. 3. a. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT). b. Pemberian izin apotek, toko obat.
5. Pemberdayaan Masyarakat.		1. Pemberdayaan promosi kesehatan skala Kabupaten/Kota.
6. Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasinalisasi bidang kesehatan.
	2. Penelitian dan pengembangan kesehatan	1. a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan Kabupaten/Kota. b. Pengelolaan suksesda skala Kabupaten/Kota. c. Implementasi penapisan IPTEK di bidang pelayanan kesehatan skala Kabupaten/Kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	3. Kerjasama Luar Negeri	1. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala Kabupaten/Kota.
	4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas.	1. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala Kabupaten/Kota.
	5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	1. Pengelolaan SIK skala Kabupaten/Kota.

C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air Kabupaten/Kota.</li><li>2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten/Kota.</li><li>3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten / Kota.</li><li>4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten/Kota.</li><li>5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat Kabupaten/Kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten/Kota.</li><li>6. -</li><li>7. -</li><li>8. -</li><li>9. Pembentukan Komisi irigasi Kabupaten/Kota.</li></ol>
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten/Kota.</li></ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.</li> <li>3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten/Kota.</li> <li>4. -</li> <li>5. -</li> <li>6. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam satu Kabupaten/Kota.</li> <li>7. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat Kabupaten/Kota.</li> <li>8. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten/Kota.</li> </ol>
	3. Pembangunan/ Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konversasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten/Kota.</li> <li>2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten/Kota.</li> <li>3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala Kabupaten/Kota.</li> <li>4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat Kabupaten/Kota.</li> </ol>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Kabupaten/Kota. 6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Kabupaten/Kota. 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten/Kota.
	4. Pengawasan dan Pengendalian.	1. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten/Kota.
2. Bina Marga	1. Pengaturan.	1. - a. - b. - c. - d. - 2. Pengaturan Jalan Kabupaten/Kota : a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan Kabupaten/Desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan Kabupaten/desa dan jalan kota. c. - d. Penetapan Status jalan Kabupaten/desa dan jalan kota. e. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan Kabupaten/desa dan jalan kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		3. - a. - b. -
	2. Pembinaan	1. Pembinaan jalan Kabupaten/Kota : a. - b. Pemberiaan bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan Kabupaten/desa dan jalan kota. c. - d. - e. - f. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. 2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan Kabupaten/desa dan jalan kota. 3. -
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	1. Pembangunan jalan Kabupaten/Kota: a. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan Kabupaten/desa dan jalan Kota. c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan Kabupaten/desa dan jalan Kota. d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan Kabupaten/desa dan jalan Kota. 2. - a. - b. -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	4. Pengawasan	1. - a. - b. -  2. Pengawasan jalan Kabupaten/Kota : a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan Kabupaten / desa dan jalan kota. b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan Kabupaten/desa dan jalan kota.  3. - a. - b. -
3. Perkotaan dan Perdesaan	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah Kabupaten/kota (mengacu kebijakan nasional dan Provinsi).  2. Penetapan peraturan daerah Kabupaten/Kota mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK.
	2. Pembinaan	1. Fasilitas peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan perdesaan tingkat Kabupaten / Kota.  2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah Kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten/kota dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi.</li> <li>2. Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan dilingkungan kabupaten/kota.</li> <li>3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten/kota.</li> <li>4. Pembentukan lembaga / badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kabupaten/kota.</li> </ol>
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten/kota.</li> <li>2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ol>
4. Air Minum	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan pertauran daerah kabupaten/kota mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten/kota.</li> <li>2. -</li> <li>3. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten/kota.</li> <li>4. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		5. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya. 6. -
	2. Pembinaan	1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kabupaten/kota. 2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten/kota termasuk kepada badan pengusahaan pelayanan (opertor) BUMD. 3. -
	3. Pembangunan	✓ 1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten/kota. ✓ 2. Pengembangan SPAM di wilayah kabupaten/kota untuk memenuhi SPM. ✓ 3. Fasilitas penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintahan desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dala penyelenggaraan pengembangan SPAM. ✓ 4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kabupaten/kota. ✓ 5. Penyediaan air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten / kota. ✓ 6. Penanganan bencana alam tingkat kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten/kota.</li> <li>2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ol>
5. Air Limbah	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.</li> <li>2. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten/kota sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kabupaten/kota.</li> <li>3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.</li> <li>4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota.</li> <li>5. -</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian Masalah Pelayanan Di Lingkungan Kabupaten/Kota.</li> <li>2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten/kota.</li> <li>3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.</li> </ol>
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten/kota dalam rangka memenuhi SPM.</li> <li>2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten/kota.</li> <li>3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten/kota).</li> </ol>
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten/kota.</li> <li>2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten/kota.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
6. Persampahan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS Persampahan di wilayah kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.</li> <li>2. Penetapan lembaga tingkat kabupaten/kota sebagai penyelenggara pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota.</li> <li>3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.</li> <li>4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten/kota.</li> </ol>
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. -</li> <li>2. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten/kota.</li> <li>3. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten/kota.</li> </ol>
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pembangunan PS persampahan di kabupaten/kota.</li> <li>2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan di wilayah kabupaten/kota.</li> </ol>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan kabupaten/kota.</li> <li>2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kabupaten/kota.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ol>
7. Drainase	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.</li> <li>2. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK drainase dan pematuan genangan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat.</li> </ol>
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. -</li> <li>2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah kabupaten/kota.</li> </ol>
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten/kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.</li> <li>2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten/kota.</li> <li>3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kabupaten/kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten/kota.</li> <li>2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten/kota.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ol>
8. Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Siap Bangun (kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengaturan</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kasiba/lisiba di wilayah kabupaten/kota.</li> <li>2. Penetapan peraturan daerah NSPK kasiba dan lisiba di wilayah kabupaten/kota.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Pembinaan</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. -</li> <li>2. -</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li> <ol style="list-style-type: none"> <li>c. Pembangunan</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pembangunan kasiba/lisiba di kabupaten/kota.</li> <li>2. Peiaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan kasiba/lisiba.</li> <li>3. Penetapan izin lokasi kasiba/lisiba di kabupaten/kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	d. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kasiba dan lisiba di kabupaten/kota.</li> <li>2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan kasiba dan lisiba di kabupaten/kota.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota.</li> </ol>
	2. Permukiman kumuh/ nelayan : a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah kabupaten/kota.</li> <li>2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh/nelayan di wilayah kabupaten/kota.</li> </ol>
	b. Pembinaan	1. -
	c. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh/nelayan di kabupaten/kota.</li> <li>2. Pengelolaan peremajaan /perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	d. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kabupaten/kota.</li> <li>2. Evaluasi program penanganan permukiman kumuh di kabupaten/kota.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota.</li> </ol>
	3. Pembangunan Kawasan : a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota.</li> <li>2. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota.</li> </ol>
	b. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. -</li> <li>2. -</li> </ol>
	c. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.</li> </ol>
	d. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota.</li> <li>2. Evaluasi program pembangunan kawasan di kabupaten/kota.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional.</li> <li>2. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/kota mengenai bangunan gedung dan lingkungan.</li> <li>3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten/kota.</li> <li>4. Penyelenggaraan IMB gedung.</li> <li>5. Pendataan bangunan gedung.</li> <li>6. Penetapan persyaratan administrasi teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.</li> <li>7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).</li> </ol>
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.</li> <li>2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.</li> </ol>
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.</li> <li>2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten/kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung. 3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
10. Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan. 2. - 3. - 4. - 5. - 6. -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	2. Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.</li> <li>2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.</li> <li>3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kabupaten/kota.</li> <li>4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.</li> <li>5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten/kota.</li> <li>6. Penerbitan usaha jasa konstruksi.</li> </ol>
	3. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.</li> <li>2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.</li> </ol>

**D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>
1. Pembiayaan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten/kota di bidang pembiayaan perumahan.</li><li>2. Penyusunan NSPM kabupaten/kota bidang pembiayaan perumahan.</li><li>3. Pelaksanaan penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.</li><li>4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten/kota.</li><li>5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten/kota.</li><li>6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa.</li><li>7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten/kota.</li><li>8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan di bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten/kota.</li></ol>
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten/kota di bidang pembiayaan perumahan.</li></ol>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penyusunan NSPM kabupaten/kota bidang pembiayaan perumahan.</li> <li>3. Pelaksanaan penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.</li> <li>4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten/kota.</li> <li>5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten/kota.</li> <li>6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik.</li> <li>7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten/kota.</li> <li>8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan di bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten/kota.</li> </ol>
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. b. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di bidang kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kabupaten/kota.</li> <li>3. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kabupaten/kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan, Produksi NSPM, Serta Kebijakan Dan Strategi Nasional Perumahan.</li> <li>5. Pelaksanaan Teknis Penyelenggaraan Perumahan.</li> <li>6. Memanfaatkan Badan Usaha Pembangunan Perumahan, Baik BUMN, BUMD, Koperasi, Perorangan Maupun Swasta, Yang Bergerak Di Bidang Usaha Industri Bahan Bangunan, Industri Komponen Bangunan, Konsultan, Kontraktor Dan Pengembangan.</li> <li>7. Penyusunan Pedoman Dan Manual Perencanaan, Pembangunan Dan Pengelolaan PSU Skala Kabupaten/Kota.</li> <li>8. Melaksanakan hasil sosialisasi peraturan perundang-undangan.</li> <li>9. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan.</li> <li>10. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknis pembangunan.</li> <li>11. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembangan di kabupaten/kota.</li> <li>12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal.</li> <li>13. Perumusan RPJP dan RPJM kabupaten/kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<p>14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kabupaten/kota.</p> <p>15. Pembangunan rusunawa dan rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi.</p> <p>16. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan.</p> <p>17. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten/kota, penyediaan tanah, PSU umum.</p> <p>18. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.</p>
	2. Perbaikan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kabupaten/kota..</p> <p>2. Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kabupaten/kota.</p> <p>3. -</p> <p>4. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil di kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan.</li> <li>6. Penetapan harga sewa rumah.</li> <li>7. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se- kabupaten/kota.</li> </ol>
	3. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan.</li> <li>2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau – pulau kecil.</li> <li>3. Pengelolaan PSU bantuan pusat.</li> <li>4. Pembentukan kelembagaan perumahan kabupaten/kota.</li> <li>5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan.</li> <li>6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional.</li> <li>7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus..</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
3. Pembinaan Perumahan Swadaya	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten/kota tentang perumahan swadaya.</li> <li>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.</li> <li>4. Koordinasi pelaksanaan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.</li> <li>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten/kota tentang perumahan swadaya.</li> <li>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.</li> <li>4. Koordinasi pelaksanaan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.</li> <li>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten/kota tentang perumahan swadaya.</li> <li>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.</li> <li>4. Koordinasi pelaksanaan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.</li> <li>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten/kota tentang perumahan swadaya.</li> <li>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.</li> <li>4. Koordinasi pelaksanaan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.</li> <li>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten/kota tentang perumahan swadaya.</li> <li>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.</li> <li>4. Koordinasi pelaksanaan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.</li> <li>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	6. , Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li><li>2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten/kota tentang perumahan swadaya.</li><li>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.</li><li>4. Koordinasi pelaksanaan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li><li>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li><li>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li><li>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.</li><li>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</li></ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
4. Pengembangan	1. Sistem Pengembangan Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengembangan kawasan.</li> <li>2. Penyusunan rencana kabupaten/kota dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman daerah (RP4D-kabupaten/kota).</li> <li>3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya.</li> <li>4. Penyusunan RP4D di wilayahnya.</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala kabupaten/kota.</li> <li>6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya.</li> <li>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.</li> <li>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>
	2. Kawasan Skala Besar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.</li> <li>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besardi wilayahnya.</li> <li>3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan, pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.</li> <li>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.</li> </ol>
	3. Kawasan Khusus.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.</li> <li>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</li> <li>3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</li> <li>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</li> </ol>
	4. Keterpaduan Prasarana Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.</li> <li>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.</li> <li>3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prsarana kawasan di wilayahnya.</li> <li>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prsarana kawasan di wilayahnya.</li> </ol>
	5. Keserasian Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.</li> <li>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</li> <li>3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</li> <li>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</li> </ol>
5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan perundang – undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten/kota.</li> <li>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> <li>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dalam bermukim di kabupaten/kota</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan di kabupaten/kota.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa di bidang perumahan di kabupaten/kota.</li> <li>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten/kota.</li> <li>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten/kota.</li> <li>8. Pelaksanaan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten/kota.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten/kota.</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten/kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang – undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten/kota.</li> <li>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> <li>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dalam bermukim di kabupaten/kota</li> <li>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan di kabupaten/kota.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa di bidang perumahan di kabupaten/kota.</li> <li>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten/kota.</li> <li>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten/kota.</li> <li>8. Pelaksanaan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten/kota.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten/kota.</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten/kota.</li> </ol>
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang – undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten/kota.</li> <li>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> <li>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dalam bermukim di kabupaten/kota</li> <li>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan di kabupaten/kota.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa di bidang perumahan di kabupaten/kota.</li> <li>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten/kota.</li> <li>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten/kota.</li> </ol>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Pelaksanaan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten/kota.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten/kota.</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten/kota.</li> </ol>
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang – undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten/kota.</li> <li>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> <li>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dalam bermukim di kabupaten/kota</li> <li>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan di kabupaten/kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa di bidang perumahan di kabupaten/kota.</li> <li>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten/kota.</li> <li>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten/kota.</li> <li>8. Pelaksanaan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten/kota.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten/kota.</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten/kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang – undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten/kota.</li> <li>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> <li>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dalam bermukim di kabupaten/kota</li> <li>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan di kabupaten/kota.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa di bidang perumahan di kabupaten/kota.</li> <li>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten/kota.</li> <li>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten/kota.</li> <li>8. Pelaksanaan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten/kota.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten/kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten/kota.</li> </ol>
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang – undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten/kota.</li> <li>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> <li>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dalam bermukim di kabupaten/kota</li> <li>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan di kabupaten/kota.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa di bidang perumahan di kabupaten/kota.</li> <li>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten/kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten/kota.</li> <li>8. Pelaksanaan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten/kota.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten/kota.</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten/kota.</li> </ol>
6. Pembinaan Teknologi dan Industri	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> </ol>
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> </ol>
	4. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p>
	<p>5. Pemanfaatan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p>
<p>7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peran Serta Masyarakat dan Sosial Budaya.</p>	<p>1. Pembangunan Baru</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> <li>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten/kota.</li> </ol>
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> <li>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten/kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> <li>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten/kota.</li> </ol>
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> <li>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten/kota.</li> </ol>
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> <li>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten/kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> <li>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten/kota.</li> </ol>

E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
1. Pengaturan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kabupaten/kota.</li> <li>2. -</li> <li>3. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.</li> <li>4. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.</li> <li>5. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota.</li> <li>6. -</li> <li>7. -</li> </ol>
2. Pembinaan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. -</li> <li>2. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang.</li> <li>3. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.</li> <li>4. -</li> <li>5. Pendidikan dan pelatihan</li> <li>6. Penelitian dan pengembangan</li> <li>7. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten/kota.</li> <li>8. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.</li> <li>9. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.</li> <li>10. -</li> <li>11. -</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
3. Pembangunan		<p><b>a. Perencanaan Tata Ruang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota (RTRWK).</li> <li>2. Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.</li> <li>3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK.</li> </ol> <p><b>b. Pemanfaatan Ruang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan program dan anggaran kabupaten/kota di bidang penataan ruang.</li> <li>2. Pemanfaatan kawasan strategis kabupaten/kota.</li> <li>3. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang.</li> <li>4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK.</li> <li>5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten/kota dan kawasan lintas kabupaten/kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.</li> <li>6. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.</li> <li>7. -</li> <li>8. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten/kota.</li> <li>9. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota.</li> <li>10. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<p>c. <b>Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.</li> <li>2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten kota.</li> <li>3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota.</li> <li>4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK.</li> <li>5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK.</li> <li>6. -</li> <li>7. -</li> <li>8. -</li> <li>9. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten/kota.</li> </ol>
4. Pengawasan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten/kota.</li> <li>2. -</li> <li>3. -</li> </ol>

**F. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Perumusan Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kabupaten/kota.</li> <li>b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.</li> <li>c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.</li> <li>2. Pelaksanaan SPM kabupaten/kota</li> <li>3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah kabupaten/kota dengan swasta dalam dan luar negeri.</li> <li>4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten/kota.</li> <li>5. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan lingkungan perkotaan skala kabupaten/kota.</li> <li>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan lingkungan perkotaan skala kabupaten/kota.</li> <li>6. a. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten/kota.</li> <li>b. Pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten/kota.</li> <li>7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten/kota.</li> <li>8. a. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kabupaten/kota.</li> <li>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kabupaten/kota.</li> <li>9. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten/kota.</li> <li>b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten/kota.</li> <li>10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten/kota.</li> <li>11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten/kota.</li> </ol>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	2. Bimbingan, konsultasi, dan Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten/kota.</li> <li>2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten/kota.</li> <li>3. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten/kota.</li> <li>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten/kota.</li> </ol> </li> <li>4. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten/kota</li> <li>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten/kota</li> </ol> </li> <li>5. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten/kota.</li> <li>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten/kota</li> </ol> </li> <li>6. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten/kota.</li> <li>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten/kota.</li> </ol> </li> <li>7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir, pulau-pulau kecil skala kabupaten/kota.</li> <li>8. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten/kota.</li> <li>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.</li> </ol> </li> <li>9. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten/kota.</li> <li>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.</li> </ol> </li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten/kota.</li> <li>b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kabupaten/kota.</li> <li>c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.</li> </ol> </li> <li>2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten/kota.</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten/kota.</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten/kota.</li> <li>5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten/kota.</li> <li>6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten/kota.</li> <li>7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten/kota.</li> </ol>

**V. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Statistik Umum	1. Kebijakan  2. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi  3. Fasilitas dan Pembinaan	1. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kabupaten/kota  1. -  1. -
2. Statistik Dasar	1. Statistik dasar meliputi  a. Semua          b. Survei Antar Sensus          c. Survei Berskala Nasional          d. Survei Sosial dan Ekonomi	1. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala Kabupaten / Kota  a. -  b. -  c. -  1. Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala Kabupaten / Kota  a. -  b. -  c. -  1. Pemberian dukungan survei berskala nasional ditingkat Kabupaten/Kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.  a. -  b. -  1. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Statistik Lintas Sektor Berskala Nasional	a. - 1. -
3. <b>Statistik Sektoral</b>	1. Koordinasi Statistik Antar Sektoral	1. Penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten/kota 2. -
4. <b>Statistik Khusus</b>	1. Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	1. Pengembangan jejaring statistik khusus skala kabupaten/kota

**G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
1. Perhubungan Darat	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. - 2. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten/kota. 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<p>18. -</p> <p>19. -</p> <p>20. -</p> <p>21. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.</p> <p>22. -</p> <p>23. -</p> <p>24. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten/kota.</p> <p>25. -</p> <p>26. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.</p> <p>27. -</p> <p>28. -</p> <p>29. -</p> <p>30. -</p> <p>✓ 31. Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C.</p> <p>32. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe C.</p> <p>33. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang tipe A, Tipe B, dan Tipe C.</p> <p>34. -</p> <p>✓ 35. Pembangunan terminal angkutan barang.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<p>36. Pengoperasian terminal angkutan barang.</p> <p>37. -</p> <p>38. -</p> <p>39. -</p> <p>40. -</p> <p>41. -</p> <p>42. -</p> <p>43. -</p> <p>44. -</p> <p>45. -</p> <p>46. -</p> <p>✓ 47. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>48. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten/kota.</p> <p>49. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota.</p> <p>✓ 50. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten/kota.</p> <p>51. -</p> <p>52. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>53. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<p>✓ 54. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.</p> <p>55. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata.</p> <p>56. Pemberian izin usaha angkutan barang.</p> <p>57. -</p> <p>58. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten/kota.</p> <p>59. -</p> <p>✓ 60. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, dan penghapusan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten/kota.</p> <p>61. -</p> <p>62. -</p> <p>63. -</p> <p>64. -</p> <p>65. -</p> <p>✓ 66. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan kabupaten/kota.</p> <p>67. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten/kota.</p> <p>68. -</p> <p>69. -</p> <p>70. -</p>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		71. -
		72. -
		73. -
		74. -
		75. -
		76. -
		77. -
		78. -
		79. -
		80. -
		81. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten/kota.
		82. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan atau yang menjadi isu kabupaten/kota.
		83. -
		84. -
		85. -
		86. -
		87. -
		88. -
		89. -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<p>90. -</p> <p>91. -</p> <p>92. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>93. -</p> <p>94. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.</p> <p>95. -</p> <p>96. -</p> <p>97. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten/kota.</p> <p>98. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perda kabupaten/kota bidang LLAJ.</li> <li>b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan</li> <li>c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.</li> <li>d. Perizinan angkutan umum.</li> </ul> <p>99. -</p> <p>100. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>101. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>102. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.</p> <p>103. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<p>104. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota.</p> <p>105. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota.</p> <p>106. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota.</p> <p>107. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.</p>
	<p>2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP).</p>	<p>1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten/kota.</p> <p>2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.</p> <p>3. -</p> <p>4. Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.</p> <p>5. -</p> <p>6. Pengadaan kapal SDP.</p> <p>7. -</p> <p>8. -</p> <p>9. -</p> <p>10. -</p> <p>11. -</p> <p>12. -</p> <p>13. -</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<p>14. -</p> <p>15. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.</p> <p>16. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>17. -</p> <p>18. Pembangunan pelabuhan SDP.</p> <p>19. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.</p> <p>20. -</p> <p>21. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>22. -</p> <p>23. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional, dan antar negara.</p> <p>24. Penetapan rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.</p> <p>25. -</p> <p>26. -</p> <p>27. -</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<p>28. -</p> <p>29. -</p> <p>30. -</p> <p>31. -</p> <p>32. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.</p> <p>33. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaringan terapung dan kerambah di sungai dan danau.</p> <p>34. Pemetaan alur sungai kabupaten/kota untuk kebutuhan transportasi.</p> <p>35. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten/kota.</p> <p>36. -</p> <p>37. -</p> <p>38. -</p> <p>39. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.</p> <p>40. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<p>41. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.</p> <p>42. -</p> <p>43. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kabupaten/kota.</p> <p>44. -</p> <p>45. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota.</p> <p>46. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.</p> <p>47. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota.</p> <p>48. -</p>
2. Perkeretaapian		<p>1. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota.</p> <p>2. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota.</li> <li>b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; dan</li> <li>c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kabupaten/kota.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<p>d. -</p> <p>e. -</p> <p>3. -</p> <p>4. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.</p> <p>5. -</p> <p>6. -</p> <p>7. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam kabupaten/kota.</p> <p>8. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>9. -</p> <p>10. -</p> <p>11. -</p> <p>12. -</p> <p>13. -</p> <p>14. -</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<p>15. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan / atau pemerintah daerah.</p> <p>16. -</p> <p>17. -</p> <p>18. -</p> <p>19. -</p> <p>20. -</p> <p>21. -</p> <p>22. -</p> <p>23. -</p> <p>24. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>25. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kabupaten/kota.</p> <p>26. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>27. -</p>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<p>28. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>29. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>30. -</p> <p>31. -</p> <p>32. -</p>
3. Perhubungan Laut.		<p>1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT≥7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):</p> <p>a. -</p> <p>b. -</p> <p>c. -</p> <p>d. -</p> <p>e. -</p> <p>f. -</p> <p>g. -</p> <p>h. -</p> <p>i. -</p> <p>j. -</p> <p>k. -</p> <p>l. -</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>m. -</li> <li>n. -</li> <li>o. -</li> <li>p. -</li> <li>q. -</li> <li>r. -</li> </ul> <p>2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT&lt;7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. -</li> <li>b. -</li> <li>c. -</li> <li>d. -</li> <li>e. -</li> <li>f. -</li> <li>g. -</li> <li>h. -</li> <li>i. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan.</li> <li>j. -</li> <li>k. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal</li> <li>l. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal</li> <li>m. -</li> <li>n. Penerbitan dokumen pengawakan kapal</li> <li>o. Pemberian surat izin berlayar.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<p>3. -</p> <p>4. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT&lt;7) yang berlayar di laut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. -</li> <li>b. -</li> <li>c. -</li> <li>d. -</li> <li>e. -</li> <li>f. -</li> <li>g. -</li> <li>h. Penerbitan pas kecil</li> <li>i. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil.</li> <li>j. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal</li> <li>k. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal</li> <li>l. Penerbitan sertifika keselamatan kapal</li> <li>m. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal</li> <li>n. Penerbitan dokumen pengawakan kapal</li> <li>o. -</li> </ul> <p>5. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut.</p> <p>6. -</p> <p>7. Pengelolaan pelabuhan lokal lama.</p> <p>8. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten/kota.</p> <p>9. -</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<p>10. -</p> <p>11. -</p> <p>12. -</p> <p>13. -</p> <p>14. -</p> <p>15. -</p> <p>16. -</p> <p>17. -</p> <p>18. -</p> <p>19. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional.</p> <p>20. -</p> <p>21. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal.</p> <p>22. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.</p> <p>23. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<p>24. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal.</p> <p>25. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal.</p> <p>26. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal.</p> <p>27. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal</p> <p>28. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub.</p> <p>29. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional.</p> <p>30. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.</p> <p>31. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.</p> <p>32. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.</p> <p>33. -</p> <p>34. -</p> <p>35. -</p> <p>36. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal.</p> <p>37. -</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<p>38. Izin kegiatan pengerukkan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal</p> <p>39. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.</p> <p>40. -</p> <p>41. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal.</p> <p>42. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten/kota)</p> <p>43. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.</p> <p>44. Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.</p> <p>45. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal.</p> <p>46. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal.</p> <p>47. Rekomendasi penetapan pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri.</p> <p>48. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>49. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten/kota setempat.</p> <p>50. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten/kota setempat.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<p>51. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>52. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>53. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat.</p> <p>54. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat.</p> <p>55. -</p> <p>56. Izin usaha tally di pelabuhan.</p> <p>57. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.</p> <p>58. Izin usaha ekspedisi/freight forwarder.</p> <p>59. -</p> <p>60. -</p> <p>61. -</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		62. - 63. - 64. - 65. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (rambu-rambu) danau dan sungai lintas kabupaten/kota. 66. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten/kota. 67. - 68. - 69. -
4. Perhubungan Udara	1. Angkutan Udara	1. - 2. - 3. - 4. - 5. -



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	2. Pesawat Udara	1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18. -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. - 32. -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	3. Bandar Udara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. -</li> <li>2. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.</li> <li>3. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</li> <li>4. Penetapan izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara &lt;30 tempat duduk.</li> <li>5. -</li> <li>6. -</li> <li>7. -</li> <li>8. -</li> <li>9. -</li> <li>10. -</li> <li>11. -</li> <li>12. -</li> <li>13. -</li> <li>14. -</li> <li>15. -</li> <li>16. -</li> <li>17. -</li> <li>18. -</li> <li>19. -</li> <li>20. -</li> <li>21. -</li> <li>22. -</li> <li>23. -</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. - 32. - 33. - 34. - 35. -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	4. Keselamatan Penerbangan (Kespen)	1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. -

H. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
1. Pengendalian dampak lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1. - 2. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten/kota. 3. - 4. - 5. - 6. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten/kota kecuali minyak pelumas/oli bekas. 7. - 8. - 9. - 10. - 11. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kabupaten/kota. 12. - 13. Pengawasan pelaksanaan system tanggap darurat skala kabupaten/kota. 14. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kabupaten/kota. 15. Izin lokasi penanganan limbah B3

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		16. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
	2. Analisis Terhadap Dampak Lingkungan (AMDAL)	1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten/kota, sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL. a. - b. - c. - d. - e. - 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten/kota. 4. <sup>B2</sup> Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten/kota. 5. - 6. -



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1. Pengelolaan kualitas air skala kabupaten/kota.</li> <li>✓ 2. Penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten/kota.</li> <li>✓ 3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten/kota.</li> <li>✓ 4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten/kota.</li> <li>✓ 5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum pada izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</li> <li>✓ 6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten/kota pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.</li> <li>✓ 7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten/kota.</li> <li>✓ 8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</li> <li>9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.</li> <li>10. -</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	✓ 4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara.	1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. -
	✓ 5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut.	1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten/kota. 2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten/kota. 3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut. 4. Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten/kota. 6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten/kota. 7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kabupaten/kota atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
	6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	1. - 2. - 3. - 4. - 5. -
	15. Penegakan Hukum Lingkungan	1. Penegakan hukum lingkungan skala kabupaten/kota.
	18. Laboratorium Lingkungan	1. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah. 2. -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.</li> <li>2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.</li> <li>3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.</li> <li>4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.</li> <li>5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.</li> <li>6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.</li> </ol>

I. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
1. Izin Lokasi		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. -</li> <li>2.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan</li> <li>b. Kompilasi bahan koordinasi</li> <li>c. Pelaksanaan rapat koordinasi</li> <li>d. Pelaksanaan peninjauan lokasi</li> <li>e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten/kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.</li> <li>f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.</li> <li>g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi.</li> <li>h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.</li> </ol> </li> <li>3. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.</li> </ol>
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. -</li> <li>2.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan lokasi</li> <li>b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>c. Pelaksanaan penyuluhan</li> <li>d. Pelaksanaan inventarisasi</li> <li>e. Pembentukan tim penilai tanah.</li> <li>f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari lembaga/tim penilai tanah.</li> <li>g. Pelaksanaan musyawarah</li> <li>h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian</li> <li>i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian</li> <li>j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.</li> <li>k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.</li> </ol> </li> <li>3. -</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
<b>3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>		1. - 2. a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya. e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak. 3. -
<b>4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</b>		1. - 2. Pembentukan tim pengawasan pengendalian. 3. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. 4.
<b>5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</b>		1. - 2. a. Pembentukan panitia pertimbangan landreform dan sekretariat panitia b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. c. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara. d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek landreform berdasarkan hasil sidang panitia. e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia. f. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian. 3. -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
6. Penetapan Tanah Ulayat		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. -</li> <li>2.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan panitia peneliti.</li> <li>b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.</li> <li>c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.</li> <li>d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.</li> <li>e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten/kota.</li> <li>f. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.</li> </ol> </li> <li>3. -</li> </ol>
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. -</li> <li>2.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.</li> <li>b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.</li> <li>c. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.</li> <li>d. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.</li> <li>e. Penanganan masalah yang timbul dengan pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.</li> </ol> </li> <li>3. -</li> </ol>
8. Izin Membuka Tanah		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. -</li> <li>2.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan.</li> <li>b. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota.</li> <li>c. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten/kota.</li> <li>d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan lain membuka tanah.</li> </ol> </li> <li>3. -</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
<p><b>6. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/Kota</b></p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. -</li> <li>2.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten/kota.</li> <li>b. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari;                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta pola penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan kabupaten/kota.</li> <li>2. Rencana tata ruang wilayah.</li> <li>3. Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, maupun investasi swasta.</li> </ol> </li> <li>c. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.</li> <li>d. Penyiapan draf rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</li> <li>e. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait.</li> <li>f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</li> <li>g. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</li> <li>h. Penetapan rencana rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan Bupati/Walikota.</li> <li>i. Sosialisasi tentang rencana rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.</li> <li>j. Evaluasi dan penyesuaian rencana rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.</li> </ol> </li> <li>3. -</li> </ol>



**Y. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Pos dan Telekomunikasi	1. Pos	1. - 2. - 3. - 4. Penyelenggaraan pelayanan pos pos di pedesaan 5. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan 6. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen 7. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen 8. -
	2. Telekomunikasi	1. - 2. - 3. - 4. - 5. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten/kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 6. -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. -
		6. -
		7. -
		8. -
		9. -
		10. -
		11. -
		12. -
		13. -
		14. -
		15. -
		16. -
		17. -
		18. -
		19. -
		20. -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi. 31. Pemberian izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten/kota 32. Pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordanansi Gangguan). 33. Pemberian izin instalansi penangkal petir. 34. Pemberian izin instalansi genset.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomur	1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. Pengendalian dan penerbitan terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi 7. - 8. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
	5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi	1. - 2. - 3. - 4. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga. 5. -
2. Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi	1. Penyiaran	1. - 2. -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio 4. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/ atau televisi. 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. -
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial	1. Koordinasi dan fasilitas pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten/kota

**K. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Pengarusutamaan Gender (PUG)	1 Kebijakan Pelaksanaan PUG	1 Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten/ kota  2 Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kabupaten/ kota
	2 Kelembagaan PUG	1 Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian, dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten/ kota  2 koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kabupaten/ kota  3 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten/ kota
	3 Pelaksanaan PUG	1 Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi KIE PUG skala kabupaten/ kota  2 Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kabupaten/ kota  3 Fasilitasi penyediaan data terpilih menurut jenis kelamin skala kabupaten/ kota
2 Kualita Hidup dan Perlindungan Peremmpuan	1 Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1 Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/ kota peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, dan HAM, politik lingkungan dan sosial budaya skala kabupaten/ kota

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2 Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1 Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten/ kota
	3 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan	1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten/ kota
	4 Kebijakan Perlindungan Perempuan	1 Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/ kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/ kota
	5 Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	1 Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten/ kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/ kota
	6 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan, terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/ kota
3 Perlindungan Anak	1 Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1 Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/ kota

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2 Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/ kota
	2 Pengintegrasian Hak-hak Anak dalam Kebijakan dan Progran Pembangunan	1 Pengintegrasian Hak-hak Anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten/ kota
	3 Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1 Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/ kota
4 Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1 Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak	1 fasilitas pembangunan lembaga/ organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/ kota
	2 Pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG kesejahteraan dan perlindungan anak	1 Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/ kota  2 Fasilitasi lembaga masyarakat untuk pelaksanaan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kabupaten/ kota
5 Data dan Informasi Gender dan Anak	1 Data terpilah menurut jenis kelamin dari di setiap bidang terkait  2-Data dan Informasi gender dari Anak	1 Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten/ kota dengan merujuk pada kebijakan nasional  1 Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebaran sistem informasi gender dan anak skala kabupaten/ kota



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2 Pelaksanaan pengumpulan pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebaran sistem informasi gender dan anak
	3 Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	1 Analisis pemanfaatan penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kabupaten/ kota  2 Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan snistem informasi gender dan anak skala kabupaten/ kota  3 Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kabupaten/ kota  4 -  5 -

**L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<p>1 Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi</p>	<p>1 Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan dan Pelayanan KB, Pen iningkatan partisipasi Pria, penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi serta kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak</p>	<p>1 a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB peningkatan poartisipasi Pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kalangsungan hidup ibu, bati dan anak skala kabupaten/ kota</p> <p>b. Penyelenggaran dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten/ kota</p> <p>c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kabupaten/ kota</p> <p>2 a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kahamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need" sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bati dan anak skala kabupaten/ kota</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten/ kota</p> <p>3 a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten/ kota</p> <p>b. Pemantauan tingkat drop out peserta KB</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluhan KB</li> <li>d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB</li> <li>e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan produksi</li> <li>f. penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/ AIDS dan Infeksi menular Seksual (IMS)</li> <li>g. Pembinaan penyuluhan KB</li> <li>h. Peningkatan kesehatan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan mreproduksi</li> <li>4 a. Penyediaan sasaran dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman , berkualitas dan merata skala kabupaten/ kota</li> <li>b. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi dan pelayanan dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupatn/ kota</li> <li>c. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kabupaten/ kota</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5 a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kabupaten/ kota  b. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB
2 Kesehatan reproduksi Remaja (KRR)	1 Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan perlindungan Hak-hak Reproduksi	1 a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/ AID, IMS, dan bahaya NAPZA skala kabupaten/ kota ✓ b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/ AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten/ kota ✓ 2 a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/ AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten/ kota ✓ b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/ AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/ kota  3 a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/ AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/ kota  b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/ AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten/ kota  c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/ AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor lembaga

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten/ kota</p> <p>d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/ AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten/ kota</p> <p>e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/ AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/ kota</p> <p>f. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/ AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/ kota</p> <p>4 Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/ AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten/ kota</p>
3 Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	1 Kebijakan dan pelaksanaan Pengembangan dan pemberdayaan Keluarga	<p>1 a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/ kota</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/ kota</p> <p>2 a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupate/ kota</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Penetapan sasaran bina Keluarga Balita (BKB) Bina keluarga remaja (BKR) dan Bina keluarga Lansia (BKL) skala kabupaten/ kota</li> <li>c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/ kota</li> <li>d. pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera 1 alasan ekonomi dalam kelompok Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kabupaten/ kota</li> <li>e. Pelaksanaan Pemdampingan/ magang bagi para kader / anggota kelompok UPPKS skala kabupaten/ kota</li> <li>f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kabupaten/ kota</li> <li>g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kabupaten/ kota</li> </ul>
4 Penguatan pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	1 Kebijakan dan pelaksanaan penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jaringan Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten/ kota</li> <li>b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten/ kota</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2 a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten/ kota</p> <p>b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB</p> <p>c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran institusi masyarakat Pedesaan/ Perkantoran (IMP) dalam program KB nasional,</p> <p>d. Penetapan formasi dan sosialisai jabatan fungsional penyuluh KB</p> <p>e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian</p> <p>f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional</p> <p>3 a. pelaksanaan pengelolaan personil sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama</p> <p>b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB</p> <p>c. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Penyediaam dukungan operasional IMP dalam pogram. KB nasional</li> <li>e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional</li> <li>f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian</li> <li>g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kabupaten/ kota</li> <li>h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian</li> <li>l. pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatih klinis kabupaten/ kota</li> <li>j. Pendayagunaan SDM program terlatih serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kabupaten/ kota</li> <li>k. Pendayagunaan lahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM</li> <li>l. -</li> </ul>
5 Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan edukas	1 Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kabupaten/ kota</li> <li>b. Penyelenggaraan operasional Advokasi KIE skala</li> </ul>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6 Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	1 Kebijakan dan pelaksanaan data Mikro Kependudukan dan keluarga	<p>kabupaten/ kota</p> <p>2 a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kabupaten/ kota</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan Kie skala kabupaten/ kota</p> <p>3 a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serah terima program KB dan KRR</p> <p>b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB</p> <p>c. Pemanfaatan prototipe program KB/ kesehatan reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas</p> <p>d. pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/ IADS, IMS dan bahaya NAPZA dan perlindungan Hak-hak reproduksi</p> <p>1 a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan keluarga skala kabupaten/ kota</p> <p>b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/ kota</p> <p>2 a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/ kota</p> <p>b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/ kota</p> <p>3 a. Pelaksanaan operasional sisyem informasi manajemen progeam BK nasional</p> <p>b. Pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga</p> <p>c. Pengolahan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana</p> <p>d. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah</p> <p>e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government danmelakukan diseminasi informasi</p>
7 Keserasian kabijakan Kependudukan	1 Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan	<p>1 Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan progrian kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten/ kota</p> <p>2 Pengkajian dan penyempurnaan peraturan darah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten/ kota</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3 a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kabupaten/ kota  b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten/ kota
8 Pembinaan	1 Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	1 Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kabupaten/ kota

**M. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
1. Kebijakan Bidang Sosial		1. Penetapan kebijakan bidang sosial skala kabupaten/kota mengacu pada kebijakan provinsi dan / atau nasional
2. Perencanaan Bidang Sosial		✓ 1. Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kabupaten/kota
3. Kerjasama Bidang Sosial		✓ 1. Penyelenggaraan kerja sama bidang sosial skala kabupaten/kota
4. Pembinaan Bidang Sosial		✓ 1. Koordinasi pemerintahan dibidang sosial skala kabupaten/kota
		2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi
		3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi
		✓ 4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi bidang sosial skala kabupaten/kota
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		✓ 1. Identifikasi sasaran penanggulangan sosial skala kabupaten/kota
6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		✓ 1. Penggalan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten/kota
		✓ 2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten/kota
7. Pelaksanaan Program / Kegiatan Bidang Sosial		1. Pelaksanaan program / kegiatan bidang sosial skala kabupaten/kota
8. Pengawasan Bidang Sosial		1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kabupaten / kota
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		1. Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan tembusan kepada

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
		Menteri Sosial
10. Sarana dan Prasarana Sosial		✓ 1. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten/kota
11. Pembinaan Tenaga Fungsional.Pekerja Sosial		1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kabupaten / kota 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kabupaten/kota 3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kabupaten/kota
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		1. - ✓ 2. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kabupaten/kota
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		✓ 1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial ✓ 2. Pemberian penghargaan dibidang sosial skala kabupaten / kota
14. Nilai-Nilai Kepahlawanan Keberintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Pelestarian Nilai-Nilai 2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) 3. Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional (MPN)	✓ 1. Pelestarian nilai - nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan serta nilai - nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau Provinsi skala kabupaten / kota 1. Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kabupaten / kota 1. -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
	4. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	✓ 1. Penyiapan bahan kelengkapan Usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan
15. Penanggulangan Korban Bencana	5. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	✓ 1. Penanggung jawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan sosial Nasional tingkat kabupaten / kota
16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)		- 1. Penanggulangan korban bencana skala kabupaten/kota 2. -
17. Undian		- 1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten/kota - 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kabupaten/kota 3. -
18. Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjur Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat rentan dan Tidak Mampu		- 1. Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten/kota bila diperlukan → 2. Pengendalian dan pelaksanaan undian ditingkat kabupaten/kota
19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak		1. - - 2. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten / kota
		1. - ✓ 2. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kabupaten/kota

**N Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
1. Ketenagakerjaan	<p>1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan</p> <p>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten / kota</p> <p>2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota</p> <p>3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kabupaten / kota</p> <p>5. Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten/kota, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi / tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kabupaten/kota</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar prosedur dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan, SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota</p> <p>2. Perencanaan informasi, karir dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan di kabupaten / kota</p> <p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota</p> <p>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kabupaten / kota</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
	<p>3. Pembinaan pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri</p>	<p>5. Pembinaan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kabupaten / kota</p> <p>1. a. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kabupaten / kota</p> <p>b. -</p> <p>2. a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kabupaten / kota</p> <p>b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kabupaten / kota</p> <p>3. Penyelenggaraan perizinan / pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak / perjanjian magang dalam negeri</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kabupaten/kota</p> <p>1. a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (Pencaker) dan lowongan kerja</p> <p>b. Penyusunan, Pengolahan dan penganalisisan dat pencaker dan data lowongan kerja skala kabupaten/kota</p> <p>c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kabupaten/kota</p> <p>d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja</p>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja diwilayah kerja kabupaten / kota</li> <li>2. a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/ LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kabupaten/kota</li> <li>b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kabupaten / kota</li> <li>3. Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja / <i>job fair</i> skala kabupaten / kota</li> <li>4. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kabupaten / kota</li> <li>5. a. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/ Antar Kerja Lokal (AKL)</li> <li>b. Penerbitan SPP AKL skala kabupaten / kota</li> <li>6. a. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS luar negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kabupaten / kota</li> <li>b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan Lembaga Sukarela skala kabupaten/ kota</li> <li>c. Pendaftaran dan fasilitas pembentukan TKM</li> <li>7. a. -</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
	5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. -</li> <li>c. -</li> <li>8. a. -</li> <li>b. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten / kota</li> <li>c. -</li> <li>9. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten / kota yang bersangkutan.</li> <li>10. Pelaksanaan pelatihan / bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kabupaten / kota</li> <li>11. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten / kota</li> <li>1. a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kabupaten / kota</li> <li>b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kabupaten / kota</li> <li>2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerja sama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kabupaten / kota</li> <li>3. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah kabupaten / kota</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
	6 Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	<p>4. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kabupaten / kota berdasarkan asal / alamat calon TKI</p> <p>5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kabupaten / kota</p> <p>6. a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kabupaten / kota</p> <p>b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri</p> <p>7. -</p> <p>8. a. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kabupaten / kota</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kabupaten / kota</p> <p>c. -</p> <p>9. Pelayanan kepulauan TKI yang berasal dari kabupaten / kota</p> <p>1. a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten / kota</p> <p>b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kabupaten / kota</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<p>c. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten / kota</p> <p>2. a. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh yang berdomisili di kabupaten / kota dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten / kota</p> <p>b. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh yang berdomisili di kabupaten / kota atas rekomendasi pusat dan atau provinsi</p> <p>3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kabupaten/kota</p> <p>4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kabupaten / kota</p> <p>5. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kabupaten / kota</p> <p>6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim AD-HOC pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten / kota</p> <p>7. a. Bimbingan aplikasi pengupahan diperusahaan skala kabupaten / kota</p> <p>b. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten / kota kepada Gubernur</p> <p>8. a. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan diwilayah kabupaten / kota</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
	<p>✓ 7. Pembinaan Ketenagakerjaan</p>	<p>b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan diperusahaan skala kabupaten / kota</p> <p>9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kabupaten / kota</p> <p>10. Verifikasi keanggotaan SP/SB skala kabupaten / kota</p> <p>11. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja / buruh skala kabupaten / kota dan melaporkannya kepada provinsi</p> <p>12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja / buruh untuk duduk dalam lembaga - lembaga ketenagakerjaan kabupaten/ kota berdasarkan hasil verifikasi</p> <p>1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kabupaten / kota</p> <p>2. Pemeriksaan / pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten / kota</p> <p>3. Penerbitan / rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten / kota</p> <p>4. Penanganan kasus / melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kabupaten / kota</p> <p>5. a. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala kabupaten / kota</p> <p>b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kabupaten/kota</p> <p>6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan,</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<p><i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten / kota</p> <p>7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten / kota</p> <p>8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten / kota</p> <p>9. Fasilitas pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten/ kota</p> <p>10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten / kota</p> <p>11. a. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan / atau pemerintah provinsi</p> <p>b. -</p> <p>12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten / kota kepada pemerintah</p> <p>13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten / kota kepada pemerintah</p> <p>14. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/ kota kepada pemerintah</p> <p>15. -</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
2. Ketransmigrasian	<p>1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan</p> <p>2. Pembinaan SDM Aparatur</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten / kota</p> <p>2. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang ketransmigrasian skala kabupaten / kota</p> <p>3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten / kota</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala kabupaten / kota berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah</p> <p>5. Perancangan transmigrasi daerah kabupaten / kota, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasin skala kabupaten / kota</p> <p>6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten / kota</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten / kota</p> <p>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten / kota</p> <p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten / kota</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
	3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan	<p>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketrasmigrasian skala pemerintah daerah kabupaten / kota</p> <p>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional dibidang ketrasmigrasian instansi kabupaten / kota</p> <p>1. a. Pengalokasian tanah untuk pendapatan WPT atau LPT di wilayah kabupaten / kota</p> <p>b. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten / kota</p> <p>c. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten / kota</p> <p>d. Pengusulan rencana pengarah dan perpindahan transmigrasi skala kabupaten / kota</p> <p>2. a. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten / kota</p> <p>b. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten / kota</p> <p>3. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten / kota</p> <p>4. KIE ketrasmigrasian skala kabupaten / kota</p> <p>5. a. Penyediaan informasi Pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten / kota</p>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
	4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten / kota</li> <li>6. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten / kota lain</li> <li>b. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.</li> </ul> </li> <li>7. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten / kota</li> <li>8. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi skala kabupaten / kota</li> <li>b. Penetapan status calon transmigrasi skala kabupaten / kota berdasarkan kriteria pemerintah</li> </ul> </li> <li>9. Peningkatan keterampilan dan keahlian calon transmigrasi skala kabupaten / kota</li> <li>10. Pelayanan penampungan calon transmigrasi skala kabupaten / kota</li> <li>11. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi di wilayah kabupaten / kota</li> <li>1. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala kabupaten / kota</li> <li>2. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten / kota</li> <li>3. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten / kota</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
	5. Pengarahan dan Fasilitas Perpindahan Transmigrasi	<p>4. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten / kota</p> <p>5. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten / kota</p> <p>6. a. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT atau LPT skala kabupaten / kota</p> <p>b. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggung jawab pembinaan khususnya dalam skala kabupaten / kota</p> <p>7. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten / kota</p> <p>1. a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala kabupaten / kota</p> <p>b. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala kabupaten / kota</p> <p>c. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten / kota</p> <p>d. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenal pembangunan ketransmigrasian skala kabupaten / kota</p> <p>2. a. Identifikasi dan analisa keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala kabupaten/kota</p> <p>b. Pemeliharaan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala kabupaten / kota</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<p>c. Penyusunan rencana pengarah dan fasilitas perpindahan transmigrasi skala kabupaten / kota</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala kabupaten / kota</p> <p>4. a. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi</p> <p>b. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi</p> <p>c. Pelayanan penampungan, permukiman, kesehatan, perbekalan dan informasi perpindahan transmigrasi</p> <p>d. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi</p> <p>e. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi</p> <p>5. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarah dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah kabupaten / kota</p>

O. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
1. Kelembagaan Koperasi		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan serta pembubaran koperasi</li> <li>2. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengesahan pembentukan penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten / kota</li> <li>b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirina koperasi dalam wilayah kabupaten / kota</li> </ol> </li> <li>3. Fasilitasi Pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kabupaten / kota</li> <li>4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi ditingkat kabupaten/kota sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten / kota</li> <li>5. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kabupaten / kota</li> <li>b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KPS dan USP koperasi ditingkat kabupaten / kota</li> </ol> </li> </ol>
2. Pemberdayaan Koperasi		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten / kota sesuai dengan kebijakan pemerintah</li> <li>b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten / kota</li> <li>c. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten / kota</li> </ol> </li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
3. Pemberdayaan UKM		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kabupaten / kota</li> <li>e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kabupaten / kota yang tidak melaksanakan kewajiban</li> <li>2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemyarakatan koperasi dalam wilayah kabupaten / kota</li> <li>3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kabupaten / kota</li> <li>4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kabupaten / kota</li> <li>1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kabupaten / kota meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendanaan / penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana</li> <li>b. Persaingan</li> <li>c. Prasarana</li> <li>d. Informasi</li> <li>e. Kemitraan</li> <li>f. Perijinan</li> <li>g. Perlindungan</li> </ul> </li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
4. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi		<p>2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil ditingkat kabupaten / kota meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Produksi</li> <li>b. Pemasaran</li> <li>c. Sumber Daya Manusia</li> <li>d. Teknologi</li> </ul> <p>3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kabupaten / kota meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kredit perbankan</li> <li>b. Penjaminan lembaga buku bank</li> <li>c. Modal ventura</li> <li>d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN</li> <li>e. Hibah</li> <li>f. Jenis pembiayaan lain</li> </ul> <p>1. Pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah kabupaten / kota</p>

**P. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
1. Kebijakan Penanaman Modal	1. Kebijakan Penanaman Modal	<p>1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten / kota dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten / kota, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi</p> <p>2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan dan pengawasan dalam skala kabupaten / kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi</p> <p>3. Mengkoordinasikan, merumuskan penetapan dan melaksanakan kebijakan daerah kabupaten / kota di bidang penanaman modal meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Penyiapan usulan bidang - bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup</li> <li>(2) Penyiapan usulan bidang - bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan</li> <li>(3) Penyiapan usulan bidang - bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kabupaten / kota</li> <li>(4) Penyusunan peta investasi daerah kabupaten / kota dan identifikasi potensi sumberdaya daerah kabupaten / kota terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	1. Kerjasama Penanaman Modal  2. Promosi Penanaman Modal  3. Pelayanan Penanaman Modal	(5) Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten / kota  4. Menetapkan peraturan daerah kabupaten / kota tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku  1. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten / kota  2. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten / kota  1. Mengaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan Pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kabupaten / kota  2. Melaksanakan prommosi dan penanaman modal daerah kabupaten / kota baik di dalam negeri maupun di luar negeri  3. Mengkaji, merumuskan dan penyusunan materi promosi skala kabupaten / kota  1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten / kota berdasarkan pedoman dan tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang di tetapkan pemerintah



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
	<p>4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>5. Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p>	<p>2. -</p> <p>3. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten / kota</p> <p>4. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten / kota</p> <p>5. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten / kota</p> <p>1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota</p> <p>2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi</p> <p>1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten / kota</p> <p>2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah dan pemerintah provinsi</p> <p>3. Mengumpul dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kabupaten / kota</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
	6. Penyebar-luasan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah</li> <li>2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal</li> <li>3. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten / kota kepala aparaturn pemerintah dan dunia usaha</li> <li>4 Melaksanakan pelatihan dan pendidikan penanaman modal skala kabupaten / kota</li> </ol>

**Q PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
<p><b>1 Kebijakan Bidang Kebudayaan</b></p>	<p>1 Kebudayaan</p>	<p>1 Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten / kota</p> <p>2 Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten / kota mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan</p> <p>3 Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten / kota mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan / anugerah bagi insan / lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan</p> <p>4 Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten / kota mengenai kerja sama luar negeri dibidang kebudayaan skala kabupaten / kota</p>
	<p>2 Tadisi</p>	<p>1 Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten / kota di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.</p> <p>2 Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten / kota dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kabupaten / kota.</p>
	<p>3 Perfilman</p>	<p>1 Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kabupaten / kota.</p> <p>2 Pemberian izin usaha perfilman pembuatan film oleh tim asing skala kabupaten / kota.</p> <p>3 Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film, (VCD,DVD), pertunjukan fillm (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan.</p> <p>4 Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten / kota dibidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman.</p>

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<p>5 Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten / kota mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman.</p> <p>6 Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan perfilman skala kabupaten / kota.</p> <p>7 Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten / kota mengenai kegiatan standarisasi di bidanga peningkatan produksi dan apresiasi film skala kabupaten / kota.</p> <p>8 Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kabupaten / kota.</p>
	4 Kesenian	<p>1 Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten / kota mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian</p> <p>2 Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerja sama luar negeri skala kabupaten / kota.</p> <p>3 Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan vestifal, pameran, dan lomba tingkat kabupaten / kota.</p> <p>4 Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidan kesenian skala kabupaten / kota.</p> <p>5 Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kabupaten / kota.</p> <p>6 Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten / kota.</p> <p>7 Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kabupaten / kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	✓	dan konsultasi perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten / kota.
	4 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten / kota
	5 Peningkatan Kapasitas Aparatur	1 Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpoi di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten / kota

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<p>8 Pelaksanaan pembentukan dan / atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten / kota.</p> <p>9 Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten / kota peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.</p> <p>10 Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten / kota dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kabupaten / kota.</p>
	5 Sejarah	<p>1 Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten / kota di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kabupaten / kota.</p> <p>2 Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten / kota di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.</p> <p>3 Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten / kota di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.</p> <p>4 Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten / kota pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.</p> <p>5 Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kabupaten / kota.</p> <p>6 Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kabupaten / kota.</p> <p>7 Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten / kota mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah.</p>

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<p>8 Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten / kota mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kabupaten / kota.</p> <p>9 Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten / kota penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kabupaten / kota.</p>
	<p>6 Purbakala</p> <p style="text-align: center;"><i>bcu.</i></p>	<p>1 Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "cultural diversity, protection on cultural and natural heritage" skala kabupaten / kota.</p> <p>2 Penerapan kebijakan perlindungan, Pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB / situs skala kabupaten / kota.</p> <p>3 Penetapan BCB / situs skala kabupaten / kota.</p> <p>4 Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kabupaten / kota.</p> <p>5 Penerapan pedoman penelitian arkeologi.</p> <p>6 Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kabupaten / kota.</p> <p>7 Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kabupaten / kota.</p>
<p>2 Pelaksanaan Bidang Kebudayaan</p>	<p>1 Penyelenggaraan</p>	<p>1 Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten / kota, meliputi</p> <p>a Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.</p> <p>b Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</p>

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<p>c Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.</p> <p>d Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.</p> <p>e Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</p> <p>2 Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kabupaten / kota meliputi :</p> <p>a Pelaksanaan dan hasil kegiatan.</p> <p>b Pengendalian dan pengawasan kegiatan.</p> <p>c Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.</p> <p>d Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten / kota.</p> <p>e Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kabupaten / kota.</p> <p>f Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kabupaten / kota.</p> <p>3 Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian indonesia keluar negeri dari kabupaten / kota.</p> <p>4 Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten / kota.</p> <p>5 Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kabupaten / kota.</p> <p>6 Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kabupaten / kota.</p>

*Seni -*

*Seni*

*Seni*

*Seni*



SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<p>7 Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kabupaten / kota.</p> <p>8 Pengawasan pembuatan fillm oleh tim asing di kabupaten / kota.</p> <p>9 Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kabupaten / kota.</p> <p>10 Fasilitasi organisasi / lembaga perfilman di kabupaten / kota.</p> <p>11 Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekanman videp di kabupaten / kota.</p> <p>12 Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten / kota.</p> <p>13 Perizinan membawa BCB ke luar kabupaten / kota dalam satu provinsi.</p> <p><i>bu</i> 14 <sup>4</sup>Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kabupaten / kota.</p> <p><i>bu</i> 15 Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kabupaten / kota.</p> <p><i>bu</i> 16 Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kabupaten / kota.</p> <p><i>bu</i> 17 Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten / kota.</p> <p><i>bu</i> 18 Pelaksanaan seminar / lokakarya sejarah lokal dalam perfektif nasional di kabupaten / kota.</p> <p><i>bu</i> 19 Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kabupaten / kota.</p> <p><i>bu</i> 20 Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten / kota.</p>

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<p><i>kec.</i> 21 Pemetaan sejarah skala kabupaten / kota.</p> <p><i>bid.</i> 22 Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kabupaten / kota.</p> <p><i>bid.</i> 23 Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB / situs warisan budaya dunia skala kabupaten / kota.</p> <p>24 Registrasi BCB / situs dan kawasan skala kabupaten / kota.</p> <p>25 Pengusulan penetapan BCB / situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB / situs skala kabupaten / kota.</p> <p>26 Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB / situs skala kabupaten / kota.</p> <p>27 Koordinasi dan fasilitasi, peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB / situs skala kabupaten / kota.</p> <p>28 Perizinan survei dan pengangkatan BCB / situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.</p> <p><i>kec.</i> 29 Pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten / kota.</p> <p><i>bid.</i> 30 Registrasi museum dan koleksi di kabupaten / kota.</p> <p><i>bid.</i> 31 Penyelenggaraan akreditasi museum di kabupaten / kota.</p> <p><i>kec.</i> 32 Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kabupaten / kota.</p>
3 Kebijakan Bidang Kepariwisata-an	1 Kebijakan	<p>1 Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kabupaten / kota.</p> <p>a RIPP kabupaten / kota.</p>

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten / kota dalam pengembangan sistem informasi pariwisata.</li> <li>c Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten / kota dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.</li> <li>d Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten / kota.</li> <li>e Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usah dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten / kota.</li> <li>f Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kabupaten / kota.</li> <li>g Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran / event budaya dan pariwisata skala kabupaten / kota.</li> <li>h Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten / kota.</li> <li>i Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten / kota.</li> </ul> <p>2 Pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten / kota.</p> <p>3 Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten / kota.</p> <p>4 Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten / kota.</p>

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		5 Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten / kota.
4 Pelaksanaan Bidang kepariwisataan	1 Penyelenggaraan	<p>1 Penyelenggaraan promosi skala kabupaten / kota :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten / kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.</li> <li>b Peserta / penyelenggaraan pameran / event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah / provinsi.</li> <li>c Pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten / kota.</li> <li>d Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten / kota.</li> <li>e Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten / kota.</li> <li>f Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi</li> </ul> <p>2 Pengembangan sistem Informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten / kota.</p> <p>3 Penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata nasional skala kabupaten / kota.</p>
5 Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata		<p>1 Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kabupaten / kota.</p> <p>2 Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten / kota dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten / kota.</p>

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<p>3 Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten / kota penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten / kota.</p> <p>4 Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kabupaten / kota berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.</p>

**R. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. <b>Kepemudaan</b>	1. Kebijakan di bidang Kepemudaan	1. Penetapan kebijakan dibidang kepemudaan skala Kabupaten / Kota : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan.</li> <li>b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan.</li> <li>c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral.</li> <li>d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas.</li> <li>e. Kemitraan dan kewirausahaan.</li> <li>f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ)</li> <li>g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan.</li> <li>h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi.</li> <li>i. Peningkatan prasarana dan sarana.</li> <li>j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi.</li> <li>k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.</li> <li>l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan</li> <li>m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.</li> <li>n. -</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Pelaksanaan	1. Pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan sakal kabupaten / kota : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten / kota, provinsi, nasional dan internasional</li> <li>b. Fasilitas dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kabupaten / kota.</li> <li>c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.</li> <li>d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten / kota.</li> <li>e. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten / kota, provinsi, pemeirntah dan internasional.</li> </ul>
	3. Koordinasi	1. Koordinasi didang kepemudaan skala kabupaten / kota. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi antar dinas instansi terkait.</li> <li>b. Koordinasi dengan lembaga non pemeintah.</li> <li>c. Koordinasi antar kecamatan skala kabupaten / kota.</li> <li>d. -</li> </ul>
	4. Pembinaan dan pengawasan	1. Pembinaan dan pengawasan dibidang kepemudaan skala kabupaten / kota. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.</li> <li>b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan dibidang kepemudaan.</li> <li>d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan.</li> <li>e. Pembinaan pembeian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan</li> <li>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan</li> <li>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</li> <li>h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.</li> </ul>
2. Olah Raga	1. Kebijakan dibidang Keolahragaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten / kota : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.</li> <li>b. Penyelenggaraan keolahragaan.</li> <li>c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.</li> <li>d. Pengelolaan keolahragaan</li> <li>e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.</li> <li>f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana.</li> <li>g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</li> </ul> </li> </ul>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Pendanaan keolahraaan.</li> <li>i. Pengembangan IPTEK keolahragaan</li> <li>j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.</li> <li>k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.</li> <li>l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.</li> <li>m. Pengembangan manajemen olahraga.</li> <li>n. dan kewirausahaan olahraga.</li> <li>o. Pengembangan IPTEK olahraga.</li> <li>p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.</li> <li>q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga</li> <li>r. Pengaturan sistem penganugerahan, dan kesejahteraan pelaku olahraga</li> <li>s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.</li> <li>t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga</li> <li>u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan</li> <li>v. Kritria lembaga keolahragaan.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.  x. -
	2. Pelaksanaan.	2. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten / kota :  a. Aktivitas keolahragaan skala kabupaten / kota, provinsi, nasional, dan internasional.  b. Fasilitas dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten / kota.  c. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten / kota, provinsi, pemerintah dan internasional.  d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.  e. Pendanaan keolahragaan.  f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.  g. Pembangunan serta pembinaan prestasi olahraga.
	3. Koordinasi	1. Koordinasi bidang keolahragaan skala kabupaten / kota :  a. Koordinasi antar dinas / instansi terkait.  b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.  c. Koordinasi antara kabupaten / kota dan kecamatan.  d. -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4. Pembinaan dan pengawasan	1. Pembinaan dan pengawasan dibidang keolahragaan skala kabupaten / kota : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.</li> <li>b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.</li> <li>c. Pembinaan Pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.</li> <li>d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.</li> <li>e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kabupaken / kota.</li> <li>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan</li> <li>g. Pembinaan perencanaan penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.</li> <li>h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.</li> <li>i. Pembinaan dan pengembangari industri olahraga.</li> <li>j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.</li> <li>k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran / dana.</li> </ol>

**S. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI.**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan ✓	1 Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten / kota.
	2. Pelaksanaan kegiatan ✓	1 Pelaksanaan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten / kota
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan. ✓	1 Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan dan penghargaan kebangsaan kabupaten / kota.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan ✓	1 Pengawasan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten / kota.
	5 Peningkatan Kapasitas Aparatur. ✓	1 Peningkatan kapasitas aparaturnya di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten / kota.
2 Kewaspadaan Nasional.	1 Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan ✓	1 Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		asing skala kabupaten / kota.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten / kota.
	3 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan ✓	1 Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dn tenaga kerja, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten / kota.
	4 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan ✓	1 Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten / kota.
	5 Peningkatan Kapasitas Aparatur. ✓	1 Peningkatan kapasitas aparaturn kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten / kota.
3 Ketahanan Seni, Budaya, agama dan kemasyar	1 Penetapan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan	1 Koordinasi Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten / kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2 Pelaksanaan Kegiatan.	1 Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten / kota
	3 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan ✓	1 Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan skala kabupaten / kota.
	4 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten / kota.
	5 Peningkatan Kapasitas Aparatur.	1 Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan kabupaten / kota.
4 Politik Dalam Negeri	1 Penetapan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan ✓	1 Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten / kota.
	2 Pelaksanaan Kegiatan	1 Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten / kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan ✓	1 Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, kebudayaan dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten / kota.
	4 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan ✓	1 Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten / kota.
	5 Peningkatan Kapasitas Aparatur ✓	1 Peningkatan kapasitas aparaturnya di bidang sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten / kota.
5 Ketahanan Ekonomi	1 Penetapan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan ✓	1 Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten / kota.
	2 Pelaksanaan Kegiatan ✓	1 Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten / kota
	3 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi

T. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Otonomi Daerah	<p>1 Urusan Pemerintahan :</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembinaan sosialisasi, bimbingan, Konsultasi, Supervisi koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan</p> <p>c. Harmonisasi</p> <p>d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)</p>	<p>1 -</p> <p>2 Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten / kota</p> <p>1 Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.</p> <p>2 Penyelenggaran pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kabupaten / kota</p> <p>1 Harminisasi peraturan daeran dengan perauran perundang undangan yang lebih tinggi</p> <p>2 Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten / kota sengan pewmerintah dan pemerintahan daerah provinsi</p> <p>1 Penyusunan LPPD</p> <p>2 Penyampaian LPPD Kabupaten / kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur</p> <p>3 -</p>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	e. Database	1 Pengolahan database LPPD skala kabupaten / kota	
	2 Penata Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus)	a. Kebijakan	1 Pengusulan penata daerah skala kabupaten / kota 2 Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan / atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah 3 Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
		b. Pembentukan Daerah	1 Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah 2 Pembentukan kecamatan 3 a. Pengusulan perubahan batas kabupaten / kota, nama dan pemindahan ibukota daerah b. Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten / kota dan pemindahan ibukota kabupaten
		c. Pembinaan Sosialisasi, Observasi dan pengkajian Penataan Daerah dan Otsus	1 Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah. 2 Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan Otsus
		d. Monitoring dan Evaluasi serta pengawasan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsusu	1 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten / kota  3. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten / kota
	e. Pembangunan Sistem (Database) penataan daerah dan otsus	1. Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan otsus skala kabupaten / kota  2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kabupaten / kota ke provinsi dan pemerintah
	f. Pelaporan	1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah  2. Pengolahan database laporan penataan daerah skala kabupaten / kota  3. Penyampaian laporan penataan daerah skala kabupaten / kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
	3 Fasilitas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL) :  a. DPOD  b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)	1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten / kota, untuk sidang DPOD  2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD  1. Penyusunan Perda kabupaten / kota  2. Pengajuan Rancangan peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	c. Fasilitasi Asosialisasi daerah / badan Kerjasama daerah	3 Menyampaikan perda kepada pemerintah untuk di evaluasi 1 Membentuk asosialisasi daerah / badan kerjasama daerah 2 -
	4 Pengembangan kapasitas dan evaluasi kinerja daerah  a. Penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM)  (1) Kebijakan  (2) Pembinaan  b. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah  c. Pengembangan kapasitas daerah :  (1) Kebijakan  (2) Pelaksanaan	1 Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kabupaten / kota  1 Penerapan SPM Kabupaten / kota  2 -  3 -  1 a. -  b. -  1 Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah  2 Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten / kota  1 Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten / kota

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	(3) Pembinaan	2 Fasilitas implementasi rencana tindak kabupaten / kota 1 -
	5 a. tata Tertib DPRD :	2 Koordinasi pengembangan kapasitas kabupaten / kota
	(1) Kebijakan	1 Penetapan pedoman tata tertib DPRD kabupaten / kota
	(2) Pembinaan	1 -
		2 -
	b. Peresmian pengangkatan dan pemberhentian Anggota DPRD Provinsi /Kabupaten / kota	1 -
	c. Pemilihan pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah (KDH) dan wakil KDH :	1 -
	(1) Kebijakan	1 Fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati / walikota dan wakil walikota
	(2) Pelaksanaan	2 -
	d. Kedudukan protokoler dan keuangan DPRD :	1 Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten / kota
(1) Kebijakan	1 - 2 -	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>(2) Pembinaan</p> <p>e. Kedudukan keuangan KDH dan wakil KDH</p> <p>(1) Kebijakan (2) Pembinaan</p> <p>f. Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) KDH</p> <p>(1) Kebijakan (2) Pembinaan</p> <p>g. Tugas dan wewenang serta kedudukan Keuangann gubernur sebagai Wakil Pemerintah</p> <p>(1) Kebijakan (2) Pembinaan</p>	<p>1 Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati / walikota dan wakil walikota</p> <p>1 -</p> <p>1 Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati / walikota</p> <p>1 -</p> <p>2 -</p> <p>1 -</p> <p>2 -</p>
2 Pemerintahan umum	<p>1 Fasilitasi Dekonsentrasi tugas pembantuan dan kerjasama :</p> <p>a. Fasilitasi Dekonsentrasi</p>	<p>1 -</p> <p>2 -</p> <p>3 -</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	b. Fasilitasi tugas pembantuan	1 Pelaksanaari dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan / atau pemerintah provinsi 2 Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan kepada desa 3 -
	c. Fasilitasi kerjasama daerah dengan pihak ketiga	1 Penetapan kebijakan kabupaten / kota di bidang kerjasama dengan pihak ketiga 2 Pelaksanaan kerjasama kabupaten / kota dengan pihak ketiga 3 - 4 - 5 Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kabupaten / kota dengan pihak kebtiga kepada provinsi
	d. Kerjasama antar daerah	1 Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten / kota 2 - 3 - 4 Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten / kota kepada provinsi
	e. Pembinaan wilayah	1 Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten/kota dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	f. Koordinasi pelayanan umum	2 Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/ desa/kelurahan di wilayahnya 3 Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/ desa / kelurahan di wilayahnya 4 Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kabupaten/ kota 5 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintah sisa skala kabupaten / kota 1 Pelaksanaan pelayanan umum skala kabupaten/ kota
	2 Trantibum dan linmas a. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1 Penetapan kebijakan kabupaten/ kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang : (a) Penegakan Perda / peraturan kepala daerah (b) Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (c) Kepolisipamongprajaan dan PPNS (d) Perlindungan Masyarakat 2 Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat skala kabupaten / kota 3 Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala kabupaten/ kota 4 Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kabupaten / kota

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	b. Koordinasi perlindungan dan poenegakan Hak Asasi Manusisa (HAM)	5 Koordinasi dengan instansi terkait skala kabupaten/ kota 1 Koordinasi penegakan HAM skala kabupaten / kota
	3 Wilayah Perbatasan :  a. Pengelolaan perbatasan antar negara        b. Perbatasan Daerah   c. Toponimi dan pemetaan wilayah          d. Pengembangan wilayah perbatasan	1 - 2 Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara 3 Dukungan koordinasi antar kecamatan/ desa/ kelurahan yang berbatasan dengan negara lain 4 - 1 Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa / kelurahan di kabupaten/ kota 1 Penetapan kebijakan kabupaten / kota mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten/ kota 2 Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kabupaten/ kota 3 Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten/ kota 1 Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten/ kota



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	b. Penanganan bencana  c. Penanganan pasca bencana  d. Kelembagaan  e. Penanganan Kebakaran	1 Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana skala kabupaten/ kota  1 Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kabupaten/ kota  1 Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kabupaten/ kota  1 Penetapan Kebijakan, Koordinasi dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kabupaten/ kota
3 Administrasi Keuangan Daerah	1 Organisasi dan kelembagaan Pengelolaan keuangan daerah	1 Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kabupaten/ kota
	2 Anggaran Daerah	1 Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah  ② Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kabupaten/ kota  ③ Perencanaan anggaran penanganan kabupaten/kota  ④ Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD  5 Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah  6 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) dan Lembaga Keuangan Mikro</p> <p>d. Pinjaman Daerah</p>	<p>4 Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kabupaten/ kota</p> <p>1 Penetapan kebijakan pengelolaan BUMN dan lembaga keuangan mikro kabupaten / kota</p> <p>2 Pelaksanaan pelaksanaan BUMN dan lembaga keuangan mikro kabupaten/ kota, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa</p> <p>3 Pengawasan pengelolaan BUMN dan lembaga keuangan mikro kabupaten/ kota, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa</p> <p>1 Penetapan kebijakan Pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten / kota</p> <p>2 Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Kabupaten/ kota</p> <p>3 Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU kabupaten/ kota</p>
	<p>4 Data perimbangan</p> <p>a. Dana Alokasi Umum ( DAU)</p>	<p>1 Pengelolaan data besar perhitungan alokasi DAU kabupaten/ kota</p> <p>2 Pengelolaan DAU kabupaten/ kota</p> <p>3 Pelapora pengelolaan DAU kabupaten/ kota</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	b. Dana Alokasi Khusus (DAK)	1 Usulan program dan kegiatan kabupaten/ kota untuk didanai dari DAK 2 - 3 Pengelolaan DAK (bagi kabupaten/ kota yang menerima DAK ) 4 - 5 Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK
	c. Dana Bagi hasil	1 Penyiapan data realisasi 2 - 3 - 4 Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH
	5 Pelaksanaa, penatausahaan, akuntansi dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	1 Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/ kota dan desa 2 Penyuluhan laporan kauangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/ kota dan APB desa 3 - 4 Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa 5 Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjasi tanggungjawab bersama

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		(urusan concurrent) 6 Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa
4 Perangkat Daerah	1 Kebijakan	1 Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kabupaten/ kota 2 Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kabupaten/ kota 3 Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kabupaten/ kota 4 Pelaksanaan pedoman tataaksana perangkat daerah kabupaten/ kota 5 Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kabupaten/ kota
	2 Pengembangan Kapasitas	1 Pelaksanaan pelaksanaan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kabupaten/ kota 2 Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah
	3 Fasilitas	1 -
	4 Pembinaan dan pengendalian	1 Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah 2 - 3 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5 Kepegawaian	5 itoring dan evaluasi	1 - 2 Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah 3 Penyediaan bahan database perangkat daerah skala kabupaten / kota
	1 Formasi pegawai Negeri Sipil (PNS)	1 Penyusunan formasi PNSD di kabupaten/ kota setiap tahun anggaran 2 Penetapan informasi PNSD di kabupaten/ kota setiap tahun anggaran 3 Usulan iformasi PNSD di Kabupaten/ kota setiap tahun anggaran
	2 Pengadaan pegawai Negeri Sipil (PNS)	1 Pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten/ kota 2 Usulan penetapan NIP 3 -
	3 Pengangkatan Calon Pegawai Isipil (CPNS)	1 Peneiapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kabupaten/ kota 2 Pelaksanaan pengangkatan CPNSD di lingkungan kabupaten/ kota 3 Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4 Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNSD) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1 - ✓ 2 Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan kabupaten/ kota 3 - 4 -
	5 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	1 Penetapan kebutuhan diklat PNSD kabupaten/ kota 2 Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat kabupaten/ kota 3 Pelaksanaan diklat skala kabupaten/ kota
	6 Kenaikan Pangkat	1 - 2 a. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten/ kota menjadi golongan ruang I/b s.d III/b b. - ✓ 3 - 4 Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian
	7 Pengangkatan pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan	✓ 1 Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kabupaten/ kota dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten/ kota dalam dan dari jabatan struktural eselon II

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2 Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten/ kota 3 Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan perhentian eselon II PNS kabupaten/ kota 4 -
	8 Perpindahan Pegawai negeri sipil (PNS) antar instansi	1 Penerapan perpindahan PNSD kabupaten/ kota 2 - 3 - 4 -
	9 Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	1 Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di kabupaten/ kota 2 - 3 -
	10 Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) akibat tindak pidana	1 Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah
	11 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau calon pegawai sipil (CPNS)	1 Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten/ kota gol/ ruang III/ d ke bawah dan pemberhentian senagai CPNSD 2 -



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3 - 4 -
	✓ 12 Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1 Pelaksanaan Pemutakhiran data PNSD di kabupaten/ kota 2 - 3 -
	✓ 13 Pengawasan dan pengendalian	1 pengawasan dan pengendiam atas pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang kepegawaian skala kabupaten/ kota 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
	✓ 14 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1 Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkunag kabupaten/ kota 2 - 3 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		4 -
6 Persandian	1 Kebijakan	1 Penyelenggaraan persandian skala kabupaten/ kota 2 Penyelenggaraan palsan skala kabupaten/ kota 3 Penyelenggaraan sissan skala kabupaten / kota 4 Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala kabupaten/ kota
	2 Pembinaan SDM	1 Peremncanaan kebutuhan SDM persandian skala kabupaten/ kota 2 Rekrutmen calon SDM persandian skala kabupaten/ kota 3 - 4 - a. b. c. d. 5 a. b.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		6 7 -
	3 Pembinaan palsan	1 Perencanaan kebutuhan palsan skala kabupaten/ kota 2 - 3 Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala kabupaten/ kota 4 Pemeliharaan palsan tingkat O 5 Penghapusan palsan skala kabupaten/ kota
	4 Pembinaan sissan	1 Perencanaan kebutuhan sissan skala kabupaten/ kota 2 - 3 Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala kabupaten/ kota 4 Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala kabupaten/ kota 5 Penentuan pemberlakuan/ penggantian sissan jaring persandian skala

U. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
1 Pemerintahan Desa Dan Kelurahan	1 Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 2 Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten / kota.</li> </ul>
	2 Administrasi Pemerintah Desa dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 2 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 3 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 4 Data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten / kota .</li> </ul>
	3 Pengembangan Desa dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 2 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 3 Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 4 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten / kota.</li> </ul>
	4 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 a Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		kabupaten / kota. b Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD. ✓ 2 Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala kabupaten / kota. ✓ 3 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala kabupaten / kota.
	5 Keuangan dan Aset Desa	✓ 1 Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten / kota. ✓ 2 Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten / kota. ✓ 3 Pembinaan, pengawasan, dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten / kota. ✓ 4 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten / kota.
	6 Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan	✓ 1 a Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten / kota. b Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten / kota. ✓ 2 Pembinaan, pengawasan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten / kota. ✓ 3 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten / kota.
2 Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Kebijakan	1 Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten / kota.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		✓ 2 Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kabupaten / kota.
	2 Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	✓ 1 Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten / kota. ✓ 2 Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten / kota. ✓ 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten / kota.
	3 Penguatan Kelembagaan Masyarakat	✓ 1 Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten / kota. ✓ 2 Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten / kota. ✓ 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten / kota.
	4 Pelatihan Masyarakat	✓ 1 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten / kota. ✓ 2 Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten / kota. ✓ 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten / kota.
	5 Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipasi	✓ 1 Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipasi masyarakat skala kabupaten / kota.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2 Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipasi masyarakat skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipasi masyarakat skala kabupaten / kota.</li> </ul>
	6 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 2 Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten / kota.</li> </ul>
3 Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1 Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 2 Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria, dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kabupaten / kota.</li> </ul>
	2 Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 2 Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten / kota.</li> </ul>
	3 Pemberdayaan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten / kota.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2 Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaa perempuan skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten / kota.</li> </ul>
	4 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK )	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 2 Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten / kota.</li> </ul>
	5 Peningkatan Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 2 Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten / kota.</li> </ul>
	6 Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 2 Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten / kota.</li> </ul>
4 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 2 Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kabupaten / kota.</li> </ul>



SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	2 Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 2 Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten / kota.</li> </ul>
	3 Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 2 Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten / kota.</li> </ul>
	4 Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 2 Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten / kota.</li> </ul>
	5 Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 2 Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten / kota.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	6 Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 2 Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten / kota.</li> </ul>
5 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	1 Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 2 Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala kabupaten / kota.</li> </ul>
	2 Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 2 Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi lingkungan lingkup skala kabupaten / kota.</li> </ul>
	3 Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 2 Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan skala kabupaten / kota.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	4 Fasilitas Prasarana dan Sarana Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 2 Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten / kota.</li> </ul>
	5 Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 2 Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten / kota.</li> </ul>
	6 Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 Koordinasi dan fasilitasi pemsarakatan dan kerjasama teknologi perdesaan skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 2 Penyelenggaraan pemsarakatan dan kerjasama teknologi perdesaan skala kabupaten / kota.</li> <li>✓ 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemsarakatan dan kerjasama teknologi perdesaan skala kabupaten / kota.</li> </ul>

**W. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Kearsipan	1. Kebijakan	<p>1. Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kabupaten/kota berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional.</li> <li>b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional.</li> <li>c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional.</li> <li>d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional.</li> <li>e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional.</li> <li>f. -</li> <li>g. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Pembinaan  3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan  4. Akreditasi dan Sertifikasi  5. Pengawasan/Supervisi	1. Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota badan usaha milik daerah kabupaten/kota, kecamatan dan desa/ kelurahan  1. - 2. - 3. Pengelolaan arsip statis perangkat daerah kabupaten/kota, badan usaha milik daerah kabupaten/kota, perusahaan swasta dan perorangan berskala kabupaten/kota.  1. - 1. Pengawasan / supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan 2. -

**X. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Perpustakaan	1. Kebijakan	<p>1. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kabupaten/kota berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional.</li> <li>b. -</li> <li>c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kabupaten/kota sesuai kebijakan nasional</li> <li>d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala kabupaten/kota sesuai kebijakan nasional.</li> <li>e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kabupaten/kota sesuai kebijakan nasional.</li> <li>f. Penetapan dan peraturan kebijakan dibidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kabupaten/kota sesuai kebijakan nasional.</li> </ul>
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	<p>1. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan diwilayah kabupaten/kota :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar.</li> <li>b. Pengembangan SDM</li> <li>c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan.  e. Pengembangan minat baca.
	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional.	1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional.  2. -  3. Koordinasi pelestarian tingkat daerah kabupaten/kota
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kabupaten/kota sesuai kebijakan nasional.  2. -  3. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.  4. -
	5. Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan	1. -  2. -
	6. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	1. Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan  2. -  3. -

J. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Pendaftaran Penduduk	1 Kebijakan	1 Penetapan kebijakan pendaftaran/ penduduk skala kabupaten/ kota  2 -
	2 Sosialisasi ✓	1 Fasilitator sosialisasi bimbingan teknis, supervisidan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kabupaten/ kota
	3 Penyelenggaraan	1 Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten/ kota  ② Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten/ kota, meliputi :  a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ;  b. Pendaftaran perubahan alamat  c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia  d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara  e. Pendaftaran Pindah datang antar negara  f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan antar negara  g. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan  h. Penerbitan dokumen kependudukan hasil



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		pendaftaran penduduk  i. Penatausahaan pendaftaran penduduk
	4 Pemantauan dan Evaluasi	1 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten/ kota
	5 Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kabupaten/ kota
	6 Pengawasan	1 Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten/ kota
1 Pencatatan Sipil	1 Kebijakan	1 Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kabupaten/ kota  2 -
	2 Sosialisasi	✓ 1 Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kabupaten/ kota
	3 Penyelenggaraan	1 Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten/ kota  ② Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten/ kota  a. Pencatatan Kelahiran  b. Pencatatan Lahit Mati  c. Pencatatan Perkawinan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		d. Pencatatan skala sipil e. Pencatatan kematian f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak g. Pencatatan perubahan nama h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan i. Pencatatan peristiwa penting lainnya j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta k. Penerbitan dokumen pencatatan sipil l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil
3 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Pemantauan dan evaluasi	1 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten/ kota
	5 Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kabupaten/ kota
	6 Pengawasan	1 Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten/ kota
	1 Kebijakan	1 Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/ kota  2 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2 Sosialisasi	✓ 1 Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/ kota
	3 Penyelenggaraan	✓ 1 Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/ kota ✓ 2 Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kabupaten/ kota ✓ 3 Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk 4 Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan 5 Pembangunan replikasi data kependudukan di kabupaten/ kota 6 a. Pembangunan Bank data kependudukan kabupaten/ kota b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di Kecamatan 7 Perakaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan 8 Penyajian dan diseminasi informasi penduduk 9 a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten/ kota

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		b. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk aerta pencatatan sipil
	4 Pemantauan dan Evaluasi	1 Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/ kota
	5 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/ kota
	6 Pengawasan	1 Pengawasan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/ kota
4 Perkembangan Kependudukan	1 Kebijakan	1 Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kabupaten/ kota  2 Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kabupaten/ kota
	2 Sosialisasi	1 -
	3 Penyelenggaraan	1 Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten/ kota  2 Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>pembangunan berwawasan kependudukan</p> <p>3 Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kuantitas penduduk/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan</p> <p>4 Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas / penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten/ kota</p>
	4 Pemantauan dan Evaluasi	1 Pemantauan dan Evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten/ kota
	5 Pembinaan dan Fasilitas	1 -
	6 Pengawasan	1 Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten/ kota
5 Perencanaan Kependudukan	<p>1 Kebijakan</p> <p>2 Sosialisasi</p>	<p>1 Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kabupaten/ kota</p> <p>2 -</p> <p>1 -</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3 Penyelenggaraan	<p>1 a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kabupaten/ kota</p> <p>b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan</p> <p>2 Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kabupaten/ kota</p> <p>3 Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran</p> <p>4 Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik</p> <p>5 Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kabupaten/ kota</p>
	4 Pemantauan dan Evaluasi	<p>1 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten/ kota</p>
	5 Pembinaan	<p>1 -</p> <p>2 Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, dan HAM dan politik skala kabupaten/ kota</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3 Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten/ kota
2 Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1 Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1 Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/ kota peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala kabupaten/ kota
	2 Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1 Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, dan HAM, politik lingkungan, dan sosial budaya, skala kabupaten/ kota
	3 koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala kabupaten/ kota
	4 Kebijakan Perlindungan Perempuan	1 Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/ kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/ kota
	5 Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	1 Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten/ kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/ kota
	6 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan perempuan lanjut usia, dan penyandang cacat dan perempuan di

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/ kota
3 Perlindungan Anak	1 kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1 Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/ kota  2 Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/ kota
	2 Pengintegrasian Hak-Hak anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	1 Pengintegrasian Hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten/ kota
	3 Koordinasi pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan anak	1 Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/ kota
4 Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1 Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG	1 Fasilitas pembangunan lembaga/ organisasi masyarakat dan Dunia Usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten / kota
	2 Pengembangan dan penguatan jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1 Fasilitas pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/ kota  2 Fasilitas Lembaga Masyarakat untuk pelaksanaan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kabupaten/ kota
5 Data dan Informasi Gender dan Anak	1 Data terpilah menurut jenis Kelamin dari di setiap Bidang Terkait	1 Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi Gender dan anak skala kabupaten/ kota dengan merujuk pada kebijakan nasional



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2 Data dan Informasi Gender dan Anak	<p>1 Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten/ kota</p> <p>2 Pelaksanaan pengumpulan pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak</p>
	3 Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE)	<p>1 Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin khusus perempuan dan anak skala kabupaten/ kota</p> <p>2 Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten/ kota</p> <p>3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kabupaten/ kota</p> <p>4 -</p> <p>5 -</p>

Z. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Lahan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kabupaten/kota.</li> <li>2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten/kota.</li> <li>3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten/kota.</li> <li>4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kabupaten/kota</li> <li>5. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kabupaten/kota</li> <li>b. Pengembangan lahan pertanian wilayah kabupaten/kota</li> </ol> </li> <li>6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kabupaten/kota.</li> <li>7. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kabupaten/kota.</li> <li>8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten/kota</li> <li>9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada pada skala kabupaten/kota.</li> </ol>
	2. Air Irigasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. a. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan sir irigasi. 3. - 4. a. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT). b. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi. 5. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani
	3. Pupuk	1. Bimbingan penggunaan pupuk 2. - 3. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten/kota. b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 4. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk 5. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten/kota.</li> <li>2. -</li> <li>3.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten/kota</li> <li>b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida</li> <li>c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan pengembangan pestisida.</li> </ol> </li> <li>4. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.</li> <li>5. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.</li> </ol>
	5. Alat dan Mesin Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten/kota</li> <li>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kabupaten/kota</li> <li>3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar</li> <li>4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.</li> <li>5. -</li> <li>6.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten/kota</li> </ol> </li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian.</li> <li>c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian</li> <li>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita.</li> <li>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian</li> <li>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.</li> </ul>
	6. Benih Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kabupaten/kota</li> <li>    b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kabupaten/kota</li> <li>2. -</li> <li>3. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kabupaten/kota</li> <li>4. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kabupaten/kota</li> <li>5. Pengaturan penggunaan benih wilayah kabupaten/kota.</li> <li>6. a. Pembinaan dan pengawasan penangkat benih</li> <li>    b. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Bimbingan dan pemantauan produksi benih</li> <li>d. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode</li> <li>e. Pemberian izin produksi benih</li> <li>f. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.</li> <li>g. Pebanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman</li> <li>h. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk</li> <li>i. Penetapan sentra produksi benih tanaman</li> <li>j. Pengembangan sistem informasi perbenihan</li> <li>7. a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten/kota</li> <li>b. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.</li> </ul>
	7. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit agribisnis</li> <li>b. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.</li> <li>c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan</li> <li>d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten/kota</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	8. Perlindungan Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. -</li> <li>2. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT / fenomena iklim wilayah kabupaten/kota</li> <li>3. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten/kota</li> <li>4. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten/kota</li> <li>5. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten/kota</li> <li>6. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten/kota</li> <li>7. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan ekspansi OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten/kota</li> <li>8. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kabupaten konawe</li> </ol>
	9. Perizinan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin usaha tanaman pangan hortikultura wilayah kabupaten/kota</li> <li>2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota</li> </ol>
	10. Teknis Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota
	11. Pembinaan Usaha	1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten/kota 2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota 3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten konawe 4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten/kota 5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kabupaten/kota 6. Bimbingan penerapan pedoman kerja sama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1. a. Bimbingan penanganan panen pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota 2. Penghitung perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan alat, transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan hortikultura



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>wilayah kabupaten/kota</p> <p>4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten/kota</p> <p>b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten/kota</p>
	13. Pemasaran	<p>1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota</p> <p>2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota</p> <p>3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten/kota</p> <p>4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota</p>
	14. Sarana Usaha	<p>1. a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten/kota</p> <p>b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kabupaten/kota</p>
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	<p>1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota</p> <p>2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	16. Pengawasan dan Evaluasi	1. -
2. Perkebunan	1. Lahan Perkebunan	1. a. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten/kota b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten/kota c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten/kota 2. a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah kabupaten/kota b. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah kabupaten/kota c. Pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten/kota d. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah kabupaten/kota e. Penetapan serta komoditas perkebunan wilayah kabupaten/kota 3. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten/kota
	2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan	1. a. Pemanfaatan sumber - sumber air untuk perkebunan b. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. a. Pengembangan sumber- sumber air untuk perkebunan  b. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi pertekanan untuk perkebunan  c. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan
	3. Pupuk	1. Bimbingan penggunaan pupuk  2. -  3. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten/kota  b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk  c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk  d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk  4. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk
	4. Pestisida	1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten/ kota  2. -  3. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten/kota  b. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida</li> <li>d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida</li> <li>4. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida</li> </ul>
	5. Alat dan Mesin Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten/kota</li> <li>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten/kota</li> <li>3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar</li> <li>4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan</li> <li>5. -</li> <li>6. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah kabupaten/kota</li> <li>b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan</li> <li>c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan</li> <li>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita</li> <li>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan</li> </ul> </li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	6. Benih Perkebunan	<p>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel / pengrajin alat dan mesin perkebunan</p> <p>1. a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten/kota</p> <p>b. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten/kota</p> <p>2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal</p> <p>3. Pemantauan benih impor wilayah kabupaten/kota</p> <p>4. a. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah kabupaten/kota</p> <p>b. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah kabupaten/kota</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan</p> <p>d. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan</p> <p>e. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan</p> <p>f. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.</p> <p>g. Pemberian izin produksi benih perkebunan</p> <p>h. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman</li> <li>j. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk</li> <li>k. Penetapan sentra produksi benih perkebunan</li> <li>l. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan</li> <li>m. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten/kota</li> <li>n. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta</li> </ul>
	7. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber - sumber pembiayaan / kredit perkebunan</li> <li>b. bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan.</li> <li>c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan</li> <li>d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten/kota</li> </ul>
	8. Perlindungan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. -</li> <li>2. a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten/kota</li> <li>b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/ fenomena iklim wilayah kabupaten/kota</li> <li>c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten/kota</p> <p>d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten/kota</p> <p>e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten/kota</p> <p>f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten/kota</p> <p>3. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah kabupaten/kota</p> <p>4. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kabupaten/kota</p>
	9. Perizinan Usaha	<p>1. a. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah kabupaten/kota</p> <p>b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kabupaten/kota</p>
	10. Teknis Budidaya	1. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah kabupaten / kota
	11. Pembinaan Usaha	<p>1. a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerja sama usaha tani wilayah kabupaten/kota</p> <p>b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kabupaten/kota</p> <p>c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah kabupaten/kota</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		d. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten/kota  2. Bimbingan penerapan pedoman/kerja sama kemitraan usaha perkebunan
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1. a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kabupaten/kota  b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kabupaten/kota  2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kabupaten/kota  3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah kabupaten/kota  4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten/kota  b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten/kota
	13. Pemasaran	1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten/kota
	14. Sarana Usaha	1. a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten/kota  b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten/kota



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	1. Penyusunan statistik perkebunan wilayah kabupaten/kota 2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah kabupaten/kota
	16. Pengawasan dan Evaluasi	1. -
3. <b>Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>	1. Kawasan Peternakan	1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kabupaten/kota 2. a. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kabupaten/kota b. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat c. Pengembangan lahan hijauan pakan 3. Penetapan padang penggembalaan.
	2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	1. a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet 2. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet 3. a. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota b. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>wilayah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota</li> <li>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosia budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kabupaten/kota</li> <li>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota</li> <li>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel / pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota</li> <li>g. Pelaksanaan temuan - temuan teknologi baru dibidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota</li> <li>h. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewna dan kesmavet wilayah kabupaten / kota</li> <li>i. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga - lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten/kota</li> </ul>
	3. Pemanfaatan Air Untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet	1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet
	4. Obat Hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis	1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kabupaten/kota 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kabupaten/kota 3. a. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah kabupaten/kota b. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten/kota c. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak 4. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten/kota 5. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kabupaten/kota 6. a. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah kabupaten/kota b. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan c. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kabupaten/kota d. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kabupaten/kota

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah kabupaten/kota</li> <li>f. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah kabupaten/kota</li> <li>g. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kabupaten/kota</li> <li>h. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikasi wilayah kabupaten/kota</li> <li>i. Bimbingan Kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah kabupaten/kota</li> </ul>
	5. Pakan Ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kabupaten/kota</li> <li>2. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kabupaten/kota</li> <li>b. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kabupaten/kota</li> </ul> </li> <li>3. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kabupaten/kota</li> <li>b. -</li> <li>c. -</li> </ul> </li> <li>4. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kabupaten/kota</li> </ul> </li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none"><li>b. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kabupaten/kota</li><li>c. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.</li><li>d. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kabupaten/kota</li><li>e. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kabupaten/kota</li><li>f. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah kabupaten/kota</li><li>g. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (<i>home industry</i>) wilayah kabupaten/kota</li><li>h. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kabupaten/kota</li><li>i. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kabupaten/kota</li><li>j. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah kabupaten/kota</li><li>k. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kabupaten/kota</li><li>l. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kabupaten/kota</li></ul>
	6. Bibit Ternak	1. a. -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b. -</p> <p>2. a. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kabupaten/kota</p> <p>b. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kabupaten/kota</p> <p>c. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah kabupaten/kota</p> <p>d. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak</p> <p>3. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kabupaten/kota</p> <p>4. a. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kabupaten/kota</p> <p>b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kabupaten/kota</p> <p>5. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kabupaten/kota</p> <p>6. a. Pengadaan / produksi dan pengawasan semen beku wilayah kabupaten/kota</p> <p>b. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kabupaten/kota</p> <p>c. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat</p> <p>d. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten/kota</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>e. Bimbingan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) untuk kabupaten/kota</p> <p>7. a. Bimbingan penerapan standar - standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah kabupaten/kota</p> <p>b. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kabupaten/kota</p> <p>c. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten/kota</p> <p>d. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kabupaten/kota</p> <p>e. Bimbingan kastrasi ternak nono bibit wilayah kabupaten/kota</p> <p>f. Bimbingan perizinan produksi ternak wilayah kabupaten/kota</p> <p>g. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kabupaten/kota</p> <p>h. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kabupaten/kota</p> <p>i. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten/kota</p> <p>j. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kabupaten/kota</p> <p>k. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>(lokal spesifik) wilayah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kabupaten/kota</li> <li>m. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten/kota</li> <li>n. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten/kota</li> <li>c. Bimbingan pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi wilayah kabupaten/kota</li> <li>p. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah kabupaten/kota</li> </ul>
	7. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. a. Penerapan kebijakan dan pedoman perbiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kabupaten/kota</li> <li>b. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber - sumber pembiayaan/kredit program wilayah kabupaten/kota</li> <li>c. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kabupaten/kota</li> <li>d. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kabupaten/kota</li> <li>e. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah kabupaten/kota</li> </ul>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>f. -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kabupaten/kota</li> <li>b. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i>-sanitasi pada produsen dan tempat penjaan PAH</li> <li>c. Monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene</i>-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV.</li> <li>d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kabupaten/kota</li> <li>e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan</li> <li>f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit - unit pelayanan keswan wilayah kabupaten/kota</li> <li>g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit - unit pelayanan keswan wilayah kabupaten/kota</li> </ol> </li> <li>2. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kabupaten/kota</li> <li>b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner</li> </ol> </li> <li>3. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten/kota</li> <li>b. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan</li> </ol> </li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kabupaten/kota</p> <p>5. a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten/kota</p> <p>b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten/kota</p> <p>c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kabupaten/kota</p> <p>d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kabupaten/kota</p> <p>e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kabupaten/kota</p> <p>6. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan</p> <p>7. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten/kota</p> <p>8. a. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, - praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan)</p> <p>b. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan</p> <p>c. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar</li> <li>e. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu</li> <li>f. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil)</li> <li>g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP)</li> <li>h. Bimbingan pelaksanaan dan standarisasi jagal hewan</li> <li>i. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah</li> <li>j. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah</li> <li>k. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan</li> <li>l. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif</li> <li>m. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis</li> <li>n. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani dan non pangan.</li> <li>o. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>p. -</p> <p>q. -</p> <p>r. -</p> <p>s. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kabupaten / kota</p> <p>t. -</p> <p>u. -</p> <p>v. -</p> <p>w. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten/kota</p> <p>x. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan</p> <p>y. Sertifikasi keswan yang keluar / masuk wilayah kabupaten/kota</p> <p>z. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten/kota</p> <p>9. a. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di kabupaten/kota</p> <p>b. Pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>penyakit reproduksi dan penyakit gangguan reproduksi</p> <p>10. a. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>b. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan</p> <p>c. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar / masuk wilayah kabupaten / kota</p>
	9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan	<p>1. a. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kabupaten/kota</p> <p>b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kabupaten/kota</p> <p>2. a. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kabupaten/kota</p> <p>b. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kabupaten/kota</p> <p>c. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta</p> <p>3. a. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kabupaten/kota</p> <p>b. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kabupaten/kota</p> <p>4. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kabupaten/kota</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah kabupaten/kota 6. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi 7. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh 8. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak 9. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak 10. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak
	10. Perizinan / Rekomendasi	1. a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten/kota b. Pemberian izin rumah sakit hewan / pasar hewan c. Pemberian izin praktek dokter hewan d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet e. Pendaftaran usaha peternakan f. Pemberian izin usaha PRH/RPU g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan 2. - 3. -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. a. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten/kota</p> <p>b. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kabupaten/kota</p> <p>5. -</p> <p>6. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i> wilayah kabupaten/kota</p> <p>7. a. -</p> <p>b. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten/kota</p> <p>8. a. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan</p> <p>b. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak</p> <p>9. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kabupaten/kota</p> <p>10. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kabupaten/kota</p> <p>11. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk ternak</p> <p>12. a. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kabupaten/kota</p> <p>b. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kabupaten/</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	11. Pembinaan Usaha	<p data-bbox="1490 247 1547 274">kota</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1399 319 2205 383">1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/ kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten/kota</li> <li data-bbox="1399 414 2254 486">2. a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota</li> <li data-bbox="1441 518 2254 614">b. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kabupaten/kota</li> <li data-bbox="1441 646 2254 718">c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten/kota</li> <li data-bbox="1441 750 2180 853">d. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten/kota</li> <li data-bbox="1441 885 2143 925">e. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten/kota</li> <li data-bbox="1441 957 2242 1021">f. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten/kota</li> <li data-bbox="1441 1053 2254 1125">g. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerja sama usaha tani wilayah kabupaten/kota</li> <li data-bbox="1441 1157 2180 1228">h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran</li> <li data-bbox="1441 1260 2131 1324">i. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan</li> </ol>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>j. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota</li> <li>k. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>Hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kabupaten/kota</li> <li>l. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal / UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kabupaten/kota</li> <li>m. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten/kota</li> <li>3. Bimbingan penerapan pedoman kerja sama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten/kota</li> </ul>
	12. Sarana Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. a. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar saran usaha wilayah kabupaten/kota</li> <li>b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten/kota</li> </ul>
	13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota</li> <li>2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kabupaten/kota</li> <li>3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transpostasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota</li> <li>4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen,</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota</p> <p>b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota</p>
	14. Pemasaran	<p>1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten/kota</p> <p>2. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten/kota</p> <p>3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten/kota</p>
	15. Pengembangan Sistem Statistik dan Informasi Peternakan dan Keswan	<p>1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kabupaten/kota</p> <p>2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kabupaten/kota</p> <p>3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah kabupaten / kota</p> <p>4. a. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kabupaten/kota</p>
	16. Pengawasan dan Evaluasi	1. -
4. Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	<p>1. a. Identifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat ✓</p> <p>b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal ✓</p> <p>c. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan ✓</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan</li> <li>✓ 2. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi cadangan pangan masyarakat</li> <li>b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kabupaten/kota</li> <li>c. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat</li> </ul> </li> <li>✓ 3. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten/kota</li> <li>b. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan</li> <li>c. Identifikasi kelompok rawan pangan</li> </ul> </li> <li>✓ 4. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan akibat penurunan akses pangan</li> <li>b. Informasi harga di kabupaten/kota</li> <li>c. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kabupaten / kota</li> </ul> </li> <li>5. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi pangan pokok masyarakat</li> <li>b. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat</li> <li>c. -</li> </ul> </li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat</li> <li>e. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat</li> <li>f. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat</li> <li>g. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil / rumah tangga</li> <li>6. a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat kabupaten/kota</li> <li>b. Pengembangan dan fasilitas forum masyarakat kabupaten / kota</li> <li>c. Pengembangan "Trust Fund" di kabupaten / kota</li> <li>d. Pengalokasian APBD kabupaten / kota untuk ketahanan pangan</li> <li>7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten/ kota</li> </ul>
	2. Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan standar BMR wilayah kabupaten / kota</li> <li>2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kabupaten / kota</li> <li>3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten / kota</li> <li>4. a. -</li> <li>b. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		kabupaten / kota
5. Penunjang	1. Karantina	1. - 2. -
	2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat kabupaten / kota 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah kabupaten / kota 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah kabupaten / kota 4. - 5. - 6. Penyiapan tenaga didik / peserta pendidikan keahlian dan keterampilan
	3. Penyuluhan Pertanian	<input checked="" type="checkbox"/> 1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian <input checked="" type="checkbox"/> 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan / desa <input checked="" type="checkbox"/> 3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten / kota sesuai norma dan standar <input checked="" type="checkbox"/> 4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ (5) a. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja dan penyuluhan pertanian</li> <li>✓ b. Perencanaan penyuluhan pertanian ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten/kota</li> <li>✓ (6) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian ditingkat kabupaten / kota</li> </ul>
	4. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. -</li> <li>✓ 2. Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian</li> <li>3. -</li> </ul>
	5. Perlindungan Varietas	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. -</li> <li>2. -</li> <li>✓ 3. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten / kota</li> <li>✓ 4. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten / kota</li> </ul>
	6. Sumber Daya Genetik (SDG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. a. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat</li> <li>b. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya</li> <li>2. -</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	7. Standarisasi dan Akreditasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian dibidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah</li> <li>2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional dibidang standarisasi di daerah</li> <li>3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten / kota</li> <li>4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan</li> <li>5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI</li> <li>✓ 6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kabupaten / kota</li> <li>7. -</li> <li>✓ 8. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di kabupaten / kota</li> <li>9. -</li> <li>✓ 10. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di kabupaten / kota</li> <li>✓ 11. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian di kabupaten / kota</li> <li>12. Fasilitas penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten / kota</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		✓ 13. Fasilitas pelaksanaan program permasyarakatan standarisasi di kabupaten / kota  ✓ 14. Fasilitas penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di kabupaten / kota



AA. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Inventarisasi Hutan		✓ 1.7 Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah kabupaten/kota
2.	Pengukuhan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		1. -
3.	Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		
4.	Penataan Batas dan Pemetaan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		
5.	Penetapan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		
6.	Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus		1. Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kabupaten/kota dengan pertimbangan gubernur
7.	Penatagunaan Kawasan Hutan		1. Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan serta tukar menukar kawasan hutan
8.	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	L	1.1 Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
9.	Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)		1. Pertimbangan teknis penegasan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP
10.	Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP
11.	Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP
12.	Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi
13.	Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi
14.	Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi
15.	Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1. Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten/kota
16.	Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL
17.	Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL
18.	Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL
19.	Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		✓ 1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
20.	Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung	✓	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung
21.	Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung	✓	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung
22.	Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		1. Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi
23.	Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		1. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK
24.	Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK		1. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK
25.	Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK		1. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK
26.	Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten/kota
27.	Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten/kota
28.	Rencana Pengelolaan (Jangka Pendek) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten/kota
29.	Penataan Blok (Zonasi) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1. -

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
30.	Pengelolaan Taman Hutan Raya		1. Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kabupaten/kota
31.	Rencana Kehutanan		1. Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kabupaten/kota
32.	Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)		1. Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kabupaten/kota
33.	Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pertimbangan teknis kepada Gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani
34.	Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kabupaten/kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani
35.	Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi		Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten/kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani
36.	Industri Pengolahan Hasil Hutan		Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu
37.	Pentausahaan Hasil Hutan		Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten/kota
38.	Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung		Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran ( <i>Appendix</i> ) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten/kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
39.	Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan		Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala kabupaten/kota
40	Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan termasuk Hutan Mangrove		1 -
41	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		1 Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala Kabupaten/Kota
42	Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		1 Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala Kabupaten/Kota
43	Reklamasi Hutan pada Areal yang dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan		1 Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan
44	Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam		1 Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala Kabupaten/ Kota
45	Pemberdayaan Masyarakat setempat di Dalam dan di sekitar Hutan		1 Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan
46	Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan		1 Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan
47	Hutan Kota		1 Pembangunan, Pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.
48	Perbenihan Tanaman Hutan		1 Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
49	Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian alam, dan pengusahaan Taman Buru, Areal Buru, Areal Buru dan Kebun Buru		1 Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala Kabupaten/Kota
50	Pengelolaan Kawasan Suaka alam, Kawasan Pelestarian alam, dan Taman Buru		1 -
51	Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar		1 -
52	Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar		1 Pemberian Perisinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam lampiran ( <i>Appendix</i> ) CITES.  2
53	Lembaga Konservasi		1 Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala Kabupaten/Kota
54	Perlindungan Hutan		✓ 1 Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala Kabupaten/Kota.  ✓ 2 Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala Kabupaten/Kota.
55	Penelitian dan pengembangan Kehutanan		✓ 1 Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat Kabupaten/Kota dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala Kabupaten/Kota.
56	Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kehutanan		1

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
57	Penyuluhan Kehutanan		1 Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala Kabupaten/Kota.
58	Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan		1 Bimbingan, Supervisi, Konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala Kabupaten/Kota.
59	Pengawasan Bidang Kehutanan		1 Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggaraan kabupaten/kota dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat dibidang kehutanan.

BB. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah		<p>1 -</p> <p>2 Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah Kabupaten/Kota di bidang mineral, batu bara, panas bumi, dan air tanah</p> <p>3 -</p> <p>4 Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batu bara serta panas bumi skala Kabupaten/Kota</p> <p>5 Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala Kabupaten/Kota</p> <p>6 Pemberian rekomendasi teknis untuk izin penggalian dan izin penggalian dan izin penerapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah Kabupaten/Kota</p> <p>7 Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi pada wilayah Kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>8 Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batu bara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah Kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi</p> <p>9 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah Kabupaten/Kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>10 Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah Kabupaten/Kota.</p>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>11 Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah Kabupaten/Kota</p> <p>12 Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah Kabupaten/kota</p> <p>13 Pembinaan dan pengawasan perusahaan KP dalam wilayah Kabupaten / Kota</p> <p>14 Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah Kabupaten/kota</p> <p>Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah Kabupaten/kota</p> <p>16 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah Kabupaten/kota</p> <p>17 -</p> <p>18 -</p> <p>19 -</p>

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	Geologi		20 -
			21 -
			22 -
			23 Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten/kota
			24 Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta pengusahaan dari SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah Kabupaten/ kota
			25 Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah kabupaten/kota
			26 Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional Kabupaten/kota
			1 -
			✓ 2 Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah kabupaten/kota
			✓ 3 Pelaksanaan inventarisasi kawasan karat dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten/kota
	✓ 4 Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karat dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten/ kota.		
	✓ 5 Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah Kabupaten/Kota.		

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3 Ketenagalistrikan		✓ 6 Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknis, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kabupaten/Kota
		✓ 7 Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah Kabupaten/Kota
		✓ 8 Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah kabupaten/kota
		✓ 9 Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah Kabupaten/Kota.
		✓ 10 Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kabupaten/kota
		✓ 11 Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah kabupaten/kota
		✓ 12 Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah Kabupaten/kota
		1 -
		2 Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang energi dan Ketenagalistrikan
		3 -
		4 Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Kabupaten/Kota

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>5 -</p> <p>6 Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam Kabupaten/kota</p> <p>7 Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota</p> <p>8 Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota</p> <p>9 Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam Kabupaten/Kota</p> <p>10 Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota</p> <p>11 Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.</p> <p>12 Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh Kabupaten/Kota</p> <p>13 Penyediaan listrik pedesaan di wilayah Kabupaten/Kota</p> <p>14 Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten/kota</p> <p>15 -</p>

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4	Minyak dan Gas Bumi		<p>1 Perhitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah.</p> <p>2 Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah Kabupaten/kota</p> <p>3 Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas</p> <p>1 -</p> <p>2 -</p> <p>3 -</p> <p>4 -</p> <p>5 Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah Kabupaten/kota</p> <p>6 a. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah Kabupaten/Kota</p> <p>b. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas.</p> <p>c. Pemberian izin lokasi pendirian stasiun pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		<p>1 Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>2 -</p> <p>3 Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten/kota</p> <p>1 -</p> <p>2 -</p> <p>3 -</p> <p>4 Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> DESDM</p> <p>5 -</p> <p>6 -</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		7 -  8 -  9 Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala kabupaten/Kota  10 -

CC. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Kelautan		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota</li> <li>2 Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota</li> <li>3 Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota</li> <li>4 Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan kabupaten/kota</li> <li>5 Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kabupaten/kota</li> <li>6 Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut.</li> <li>7 Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan kabupaten/kota</li> <li>8 Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan kabupaten/kota</li> <li>9 Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi</li> </ul>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>✓ 10 Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan Kabupaten/Kota.</p> <p>✓ 11 Peningkatan kapasitas kelembagaan dna SDM di bidang kelautan dan perikanan</p> <p>✓ 12 Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan Kabupaten/kota</p> <p>13 Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu</p> <p>14 -</p> <p>✓ 15 Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan Kabupaten/kota</p> <p>✓ 16 Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan Kabupaten/kota</p> <p>✓ 17 Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan kabupaten/kota</p> <p>✓ 18 Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>✓ 19 Pelaksanaan koordinasi antar Kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>20 Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.</p> <p>21 Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi</p> <p>✓ 22 Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan posisi dan laut di wilayah laut kewenangan kabuapten/kota</p> <p>✓ 23 Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan Kabupaten/kota</p> <p>24 Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokas di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota</p> <p>25 Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa, dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten/ kota</p> <p>✓ 26 Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan kabupaten/kota</p> <p>✓ 27 Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kabupaten/kota</p> <p>✓ 28 Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan kabupaten/kota</p> <p>✓ 29 Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan kabupaten/kota</p> <p>✓ 30 Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu kurang)</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	Umum	<p>1 -</p> <p>2 Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kabupaten/Kota</p> <p>3 Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala Kabupaten/Kota</p> <p>4 Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kabupaten/kota</p> <p>5 Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi sistem mutu hasil perikanan</p> <p>6 Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kabupaten/kota</p> <p>7 Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kabupaten/kota</p> <p>8 Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kabupaten/kota</p> <p>9 Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kabupaten/kota</p> <p>✓ 10 Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan kabupaten/kota</p> <p>✓ 11 Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3 Perikanan Tangkap		<p>12 Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kabupaten/kota</p> <p>13 Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan</p> <p>✓ 1 Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan Kabupaten/kota</p> <p>✓ 2 Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kabupaten/kota</p> <p>3 -</p> <p>✓ 4 Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan Pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan kabupaten/kota</p> <p>✓ 5 Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>✓ 6 Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.</p> <p>✓ 7 Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kabupaten/kota</p> <p>✓ 8 Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan kabupaten/kota</p> <p>✓ 9 Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>✓ 10 Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan Perikanan tangkap kewenangan kabupaten/kota</p> <p>✓ 11 Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>✓ 12 a. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten/kota</p> <p>✓ 3 b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di tempat pelelangan ikan (TPI)</p> <p>✓ 13 Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.</p> <p>14 -</p> <p>✓ 15 Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan</p> <p>✓ 16 Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT</p> <p>✓ 17 Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkapan ikan</p> <p>18 -</p> <p>✓ 19 Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan</p> <p>✓ 20 Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.</p> <p>✓ 21 Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4 Perikanan Budidaya		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 22 Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota</li> <li>✓ 23 Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpun di perairan laut kewenangan kabupaten/kota</li> <li>✓ 24 Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.</li> <li>✓ 1 Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan</li> <li>✓ 2 Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut.</li> <li>✓ 3 Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan</li> <li>✓ 4 Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan tawar, air payau dan laut</li> <li>✓ 5 Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.</li> <li>✓ 6 Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi pembenihan ikan.</li> <li>✓ 7 Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.</li> <li>✓ 8 Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.</li> <li>✓ 9 Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 10 Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan</li> <li>✓ 11 Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.</li> <li>✓ 12 Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam</li> <li>✓ 13 Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penertiban IUP dibidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten/kota</li> <li>✓ 14 Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan atau pemeliharaan ikan</li> <li>✓ 15 Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya</li> <li>✓ 16 Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</li> <li>17 Koordinasi dari pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.</li> <li>✓ 18 Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kabupaten/kota</li> <li>✓ 19 Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.</li> <li>✓ 20 Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan</li> <li>✓ 21 Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan</li> </ul>

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5	Pengawasan dan Pengendalian		✓ 22 Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung diperairan umum dan wilayah laut kewenangan kabupaten/kota
			1 Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan
			2 Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.
			3 Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan
			4 Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya
			5 Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan
			6 Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan
			7 Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kabupaten/kota
6	Pengolahan dan Pemasaran		8 Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota
			1 Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan permasalahannya
			2 Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan
			3 a. - b. -



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7 Penyuluhan dan Pendidikan		<p>4 Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP</p> <p>5 -</p> <p>6 Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan, lingkungan tempat ikan hidup.</p> <p>7 Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan</p> <p>8 Pelaksanaan kebijakan Perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten/kota</p> <p>1 Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, Manajemen kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di kabupaten/kota</p> <p>2 Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di kabupaten/kota</p> <p>3 Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di kabupaten/kota</p>

DD PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<p>1 Perdagangan Dalam Negeri</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kabupaten/kota</li> <li>2 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin / pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kabupaten/kota</li> <li>3 Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten/kota ( SIUP) Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung untuk diminum ditempat, pengecer dan penjualan langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15 %, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang kayu antar pulau)</li> <li>4 Pengawasan, Pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala Kabupaten/kota</li> <li>5 Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di kabupaten/kota</li> <li>6 Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan ( Pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan ( jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal</li> <li>7 Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kabupaten/kota</li> <li>8 Pembinaan dan pengawasan monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten/kota</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>9 Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kabupaten/kota</p> <p>10 Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen</p> <p>11 Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten/kota</p> <p>12 Pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen skala kabupaten/kota</p> <p>13 -</p> <p>14 -</p> <p>15 Pengusulan pembentukan BPSK di kabupaten/kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi fasilitasi operasional BPSK</p> <p>16 Pendaftaran dan pengembangan LPKSM</p> <p>17 Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kabupaten/kota dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen</p> <p>18 Evauasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen</p> <p>19 Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa</p> <p>20 Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kabupaten/kota</p> <p>21 Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten/kota</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 Metrologi Legal		<p>22 Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten/kota</p> <p>23 Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala Kabupaten/kota</p> <p>24 Pembinaan dan pemberdayaan PPNS -PK skala Kabupaten/kota</p> <p>25 Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan / garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kabupaten/kota</p> <p>26 Pembinaan dan pemberdayaan PPNS- WDP skala kabupaten/kota</p> <p>27 Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kabupaten/kota</p> <p>1 Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal setelah memperoleh penilaian dan pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi</p> <p>2 Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM Metrologi Skala Kabupaten/kota</p> <p>3 a. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal</p> <p>b. -</p> <p>c. -</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3 Perdagangan Luar Negeri		<p>4 Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal oleh pemerintah</p> <p>5 Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama Metrologi legal skala kabupaten/kota</p> <p>6 Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI</p> <p>7 Pembinaan operasional reparatur UTTP</p> <p>8 Pengawasan penyidikan tindak pidana UUML</p> <p>9 -</p> <p>1 Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan bidang ekspor</p> <p>2 Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kabupaten/kota</p> <p>3 Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor</p> <p>4 Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor</p> <p>5 Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor.</p> <p>6 Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kabupaten/kota</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>7 Pengambilan contoh, pengujian inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PC yang teregistrasi</li> <li>b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi dan teregistrasi.</li> <li>c. -</li> </ul> <p>8 Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat kabupaten/kota</p> <p>9 Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang</p> <p>10 Sosialisasi, penerbitan, dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran barang ditingkat kabupaten/kota yang ditunjuk</p> <p>11 Penyediaan bahan pemasukan untuk penerbitan API</p> <p>12 Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API</p> <p>13 Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi provinsi ekspor daerah sebagai bahan untuk pengembangan perumusan kebijakan</p> <p>14 Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional</p> <p>15 Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kabupaten/kota</p> <p>16 Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan Luar Negeri</p>

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4	Kerjasama Perdagangan Internasional		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional</li> <li>2 Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional</li> <li>3 Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan Bilateral</li> <li>4 Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i>, subsidi, dan <i>safeguard</i></li> </ol>
5	Pengembangan Ekspor Nasional		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala Kabupaten/kota</li> <li>2 Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kabupaten/kota</li> </ol>
6	Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Real Gudang, Pasar Lelang		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi</li> <li>2 Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang</li> <li>3 Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten/kota</li> </ol>

EE PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Perizinan		1 - 2 Penerbitan tanda daftar industri IUI skala investasi s/d 10 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 3 Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan Provinsi 4 Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kabupaten/kota
2 Usaha Industri		1 Penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten/kota 2 - 3 -
3 Fasilitas Usaha Industri		1 - 2 Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di Kabupaten/ kota
4 Perlindungan Usaha Industri		1 - 2 Pembeian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kabupaten/kota



SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5	Perencanaan dan Program		1 Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri Kabupaten/kota 2 Penyusunan RPJM SKPD Kabupaten/Kota di bidang industri 3 Penyusunan rencana kerja kabupaten kota dibidang industri
6	Pemasaran		1 - 2 Promosi Produk industri Kabupaten/ kota
7	Teknologi		1 - 2 Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri di Kabupaten/kota 3 Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri 4 Sosialisasi hasil penelitian pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri
8	Standarisasi		1 - 2 Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten/kota 3 Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di Kabupaten/kota

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
9	Sumber daya Manusia (SDM)		1 - 2 Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten/kota 3 Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten/kota
10	Permodalan		1 Fasilitas akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten/kota
11	Lingkungan Hidup		1 Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kabupaten/kota 2 Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kabupaten/kota
12	Kerjasama Industri		1 Fasilitas kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten/kota 2 Fasilitas kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha kabupaten/kota 3 Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama sektoral dan regional untuk perberdayaan industri /kota
13	Kelembagaan		1 pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten/kota 2 - 3 Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kabupaten/kota

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
14	Sarana dan Prasana		1. Penyusunan tata ruang Kabupaten / kota industri dalam rangka pengembangan pusat – pusat industri yang terintegritas serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana ( jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah LKM ) untuk yang mengacu pada tata ruang regional ( provinsi ).
15	Informasi Industri		1. – 2. Pengumpulan, analisis dan desiminasi data bidang industri tingkat kabupaten / kota dan pelaporan kepada provinsi.
16	Pengawasan Industri		1. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kabupaten / Kota. 2. –
17	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang perindustrian di kabupaten / kota.



PJ. BUPATI KONAWE UTARA,

**H. ASWAD SULAIMAN. P**



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA

JL. TRANS SULAWESI NO. TELP. KEL. WANGGUDU KEC. ASERA

## KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWA UTARA  
NOMOR : **12** / DPRD / TAHUN 2008

## TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN 6 (ENAM) BUAH RAPERDA  
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa 6 (Enam) Buah Raperda Peraturan Daerah yang telah dibahas antara Legislatif dan Eksekutif perlu mendapat persetujuan DPRD Kab. Konawe Utara.
- b. Bahwa berhubung dengan point a diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan LNRI Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, tambahan LNRI Nomor 3699).
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 tambahan LNRI Nomor 4048).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Pusat dan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 tambahan LNRI Nomor 4355).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan LNRI Nomor 4437).
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 tambahan LNRI Nomor 4438).
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15 Tambahan LNRI Nomor 4689).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 tambahan LNRI Nomor 3838).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 tambahan LNRI Nomor 3952).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).
13. Keputusan DPRD Kab. Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Konawe Utara.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Konsultasi Panitia Khusus Legislatif dan Eksekutif.  
2. Pendapat akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Konawe Utara dalam Rapat Paripurna DPRD Kab. Konawe Utara.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN 6 (ENAM) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA.

Pertama : 6 (Enam) Buah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah termasuk Staf Ahli.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam Pembagian Urusan Pemerintah.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagai Raperda hak inisiatif DPRD Kabupaten Konawe Utara.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : W a n g g u d u

Pada tanggal : 11 J u n i 2008

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
K E T U A,



**Ir. RUKSAMIN**

Tembusan keputusan ini kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari
2. Bupati Konawe Utara di Unaaha
3. Muspida Kab. Konawe Utara di tempat
4. Kepala Dinas/Badan/Kantor Se Kab. Konawe Utara di Wanggudu
5. A r s i p